



LAPORAN KINERJA

INSPEKTORAT JENDERAL 2019





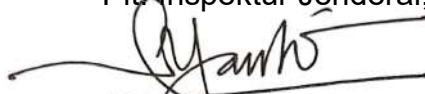
KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan karunia-NYA, Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019 dapat diselesaikan. Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan bagian dari implementasi transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam rangka *good governance* dan *clean government* Inspektorat Jenderal. Laporan Kinerja ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini menyajikan analisis capaian kinerja untuk sasaran-sasaran strategis di Inspektorat Jenderal, sekaligus sebagai bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Dengan Laporan Kinerja ini, diharapkan adanya optimalisasi meningkatkan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja seluruh jajaran di lingkungan Inspektorat Jenderal pada tahun-tahun selanjutnya.

Semoga laporan pertanggungjawaban ini dapat bermanfaat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik pada tahun mendatang.

Plt. Inspektur Jenderal,



Ir. Laksmi Wijayanti, M.CP.
NIP. 19690205 1999503 2 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Kementerian LHK mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian LHK. Pengawasan internal pemerintah merupakan unsur manajemen yang penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*). Oleh karena itu fungsi Inspektorat Jenderal dalam tugas pengawasan sangat penting dan strategis, terutama dalam upaya mencegah terjadinya penyimpangan, pelanggaran dan praktek tindak pidana korupsi.

Dalam rangka mewujudkan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal sebagai pengawas internal, maka ditetapkan Indikator Kinerja Program Tahun 2019 sebagai berikut :

Sasaran Program	
Pengawasan yang Berkualitas dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang LHK	
Indikator Kinerja Program	Target
Tingkat kapabilitas APIP Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Level 3
Kematangan Implementasi SPIP	Level 3
Nilai SAKIP Kementerian	Nilai BB

Indikator Kinerja Program (IKP) tersebut dijabarkan menjadi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut :

1. Berkurangnya jumlah Satker dengan temuan berulang;
2. Maksimum temuan Kerugian Negara (APBN) hasil pemeriksaan BPK-RI (rata-rata lima tahun terakhir);
3. Tercapainya nilai akuntabilitas kinerja Eselon I;
4. Jumlah kasus yang diselesaikan melalui pengawasan investigatif;
5. Jumlah pengaduan masyarakat (Dumas) yang diselesaikan;
6. Jumlah rekomendasi unit kerja yang WBK (3 satker/tahun);
7. Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut yang tuntas hasil audit internal;
8. Tingkat kematangan implementasi SPIP;
9. Nilai Implementasi SAKIP Itjen;
10. Tingkat kapabilitas APIP.

Secara keseluruhan capaian kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian LHK Tahun 2019 dinyatakan “berhasil”, yaitu 100% capaian dari target yang telah ditetapkan dengan penggunaan anggaran sebesar Rp85.617.728.663,00 atau sebesar 98,60% dari total anggaran sebesar Rp86.837.312.000,00. Jika dibandingkan dengan persentase realisasi anggaran Kementerian LHK dan APBN Nasional, nilai realisasi anggaran tersebut lebih besar dari persentase realisasi anggaran Kementerian LHK sebesar 95,41% dan persentase realisasi APBN Nasional (90,33%).

Berdasarkan realisasi anggaran dan capaian kinerja tersebut dilakukan perhitungan didapat nilai efisiensi sebesar 1,01. Angka ini menunjukkan bahwa pengalokasian anggaran telah digunakan secara efisien untuk mencapai kinerja yang telah ditetapkan.

Kinerja Inspektorat Jenderal tercapai dengan melakukan penilaian mandiri untuk kematangan implementasi SPIP dan tingkat kapabilitas APIP. Inspektorat Jenderal juga melaksanakan kegiatan evaluasi SAKIP masing-masing eselon I. Kegiatan tersebut menjadi tolak ukur keberhasilan Inspektorat Jenderal dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Berikut rincian capaian indikator kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2019 :

Sasaran Program			
Pengawasan yang Berkualitas dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang LHK			
Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Tingkat kapabilitas APIP Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Level 3	Level 3	100%
Kematangan Implementasi SPIP	Level 3	Level 3	100%
Nilai SAKIP Kementerian	Nilai BB	Nilai BB*	100%

* Nilai SAKIP Kementerian LHK Tahun 2019 merupakan hasil Evaluasi Implementasi SAKIP oleh Inspektorat Jenderal Kementerian LHK, nilai SAKIP Kementerian LHK masih menunggu hasil evaluasi oleh Kementerian PAN RB.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	3
C. Ruang Lingkup	4
D. Tugas dan Fungsi.....	5
E. Struktur Organisasi	6
F. Sumber Daya Manusia	9
G. Sumber Daya Anggaran	10
H. Sistematika Penyajian	11
II. PERENCANAAN KINERJA	12
A. Rencana Strategis Kementerian LHK Tahun 2015 – 2019	12
B. Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2018.....	15
III. AKUNTABILITAS KINERJA	17
A. Capaian Kinerja	17
B. Realisasi Anggaran	54
IV. PENUTUP	56
A. Simpulan	56
B. Langkah-langkah di Masa Mendatang	57
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Sebaran Pegawai PNS Inspektorat Jenderal Tahun 2018	9
Tabel 2. Anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2018 Per Jenis Belanja	10
Tabel 3. Perbandingan Anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2019 dengan Tahun 2018.....	10
Tabel 4. Indikator Kinerja Program Dalam Renstra 2015-2019	13
Tabel 5. Indikator Kinerja Kegiatan Dalam Renstra 2015-2019	14
Tabel 6. Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2019	15
Tabel 7. Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Jenderal Kementerian LHK Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019.....	16
Tabel 8. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Program Inspektorat Jenderal Tahun 2019	18
Tabel 9. Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Kementerian LHK Tahun 2019.....	21
Tabel 10. Hasil Quality Assurance Tingkat Kapabilitas APIP Kementerian LHK Tahun 2019.....	22
Tabel 11. Matrik Tingkat Kematangan SPIP	25
Tabel 12. Rincian Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Tingkat Kementerian LHK	26
Tabel 13. Matrik Nilai Evaluasi SAKIP	29
Tabel 14. Anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian LHK Tahun 2019.....	31
Tabel 15. Perbandingan Anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2018 dengan 2019 Pada Inspektorat Wilayah	31
Tabel 16. Rincian Kegiatan Audit Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Tahun 2019	32
Tabel 17. Rincian Kegiatan Reviu Tahun 2019.....	32
Tabel 18. Rincian Kegiatan Pendampingan.....	33
Tabel 19. Rincian Kegiatan Pengawasan Investigatif	33
Tabel 20. Metode Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan.....	34
Tabel 21. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Wilayah I Tahun 2019	35
Tabel 22. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Wilayah I Tahun 2015 - 2019.....	36
Tabel 23. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Wilayah II Tahun 2019	38

	Halaman
Tabel 24. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Wilayah II Tahun 2015 - 2019	39
Tabel 25. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Wilayah III Tahun 2019	41
Tabel 26. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Wilayah III Tahun 2015 - 2019	42
Tabel 27. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Wilayah IV Tahun 2019	44
Tabel 28. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Wilayah IV Tahun 2015 - 2019	45
Tabel 29. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Investigasi Tahun 2019.....	47
Tabel 30. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Investigasi Tahun 2015 - 2019.....	48
Tabel 31. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Skeretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2019.....	51
Tabel 32. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2015 - 2019	52
Tabel 33. Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2019	54
Tabel 34. Realisasi Anggaran Tahun 2019 Berdasarkan Jenis Belanja	54
Tabel 35. Capaian Tingkat Efisiensi Pelaksanaan Kinerja	55

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Wilayah Kerja Inspektorat Jenderal	6
Gambar 2. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal	8
Gambar 3. Struktur Organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal.....	8
Gambar 4. Inspektorat Jenderal Menyelenggarakan Workshop APIP 2019	18
Gambar 5. Kunjungan Kerja Inspektorat Jenderal KLHK ke Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan	20
Gambar 6. Capaian Tingkat Kapabilitas APIP Kementerian LHK Tahun 2015 s.d. 2019	22
Gambar 7. Perbandingan Realisasi Capaian Tingkat Kapabilitas APIP Kementerian LHK Tahun 2019 dengan Target Jangka Menengah	23
Gambar 8. Sosialisasi dan Bimtek SPIP di BTN Komodo.....	24
Gambar 9. Capaian Tingkat Kematangan Implementasi SPIP Kementerian LHK Tahun 2015 s.d 2019	27
Gambar 10. Perbandingan Realisasi Capaian Kematangan Implementasi SPIP Kementerian LHK Tahun 2019 dengan Target Jangka Menengah	27
Gambar 11. Capaian Nilai SAKIP Kementerian LHK Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019.....	30
Gambar 12. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Wilayah I Tahun 2015-2019.....	37
Gambar 13. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Wilayah II Tahun 2015-2019.....	40
Gambar 14. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Wilayah III Tahun 2015-2019.....	43
Gambar 15. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Wilayah IV Tahun 2015-2019	46
Gambar 16. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Investigasi Tahun 2015-2019.....	50
Gambar 17. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2015-2019	53
Gambar 18. Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2019	54

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang dibentuk dengan tugas pengawasan intern di lingkungan Kementerian LHK. Inspektorat Jenderal sebagai APIP yang efektif adalah membantu manajemen di lingkungan Kementerian LHK mencapai tujuan organisasi secara efisien, efektif dan akuntabel dengan memberikan nilai tambah dan meningkatkan jalannya organisasi untuk mengawal sasaran strategis Kementerian LHK.

Pengawasan internal pemerintah merupakan unsur manajemen yang penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*). APIP sebagai unit organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan dalam lingkup kewenangannya harus mampu merespon berbagai perubahan paradigma pengawasan yang berorientasi pada kinerja penyelenggaraan pemerintahan.


Dalam rangka membantu dan mendorong agar kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta untuk mendorong agar tujuan kegiatan pemerintahan dapat dicapai secara hemat, efisien, efektif, dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), maka ditetapkan arah kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian LHK, yaitu :

1. Audit kinerja/operasional/tujuan tertentu dan reviu laporan keuangan diprioritaskan pada pencapaian sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta mempertahankan opini WTP dan penurunan temuan hasil pemeriksaan BPK-RI yang bersifat kerugian negara;
2. Evaluasi implementasi SAKIP sebagai upaya untuk peningkatan akuntabilitas kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

3. Pembentukan Satker berpredikat WBK dan audit investigasi diprioritaskan sebagai upaya pemberantasan korupsi yang terjadi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Reviu RKA-K/L Satker sebagai upaya untuk menjamin kebenaran, kelengkapan dan kepatuhan dalam penerapan kaidah perencanaan penganggaran;
5. Pemantauan penyelesaian tindak lanjut hasil audit dan kegiatan pemantauan Indikator Kinerja Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai upaya perbaikan kinerja satker;
6. Pengembangan secara terus-menerus dan berkelanjutan sebagai upaya untuk menciptakan SDM pengawasan yang profesional;
7. Peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan sebagai upaya peningkatan akuntabilitas instansi;
8. Evaluasi penyelenggaraan SPIP sebagai upaya untuk memantau pelaksanaan pengawasan dan pengendalian (wasdal) di masing-masing Satker lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Penyelenggaraan satgas SPIP sebagai upaya penguatan kelembagaan Inspektorat Jenderal Kementerian LHK;
10. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai sebagai upaya untuk hasil pengawasan yang berdaya guna.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tanggal 14 April 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Inspektorat Jenderal mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian LHK. Oleh karena itu fungsi Inspektorat Jenderal dalam tugas pengawasan sangat penting dan strategis, terutama dalam upaya mencegah terjadinya penyimpangan, pelanggaran dan praktek tindak pidana korupsi.

Perwujudan tata kelola dan tata pemerintahan negara yang baik (*good governance*) hanya dapat terwujud melalui kegiatan pengawasan profesional yang dapat dievaluasi dan dimonitor oleh manajemen. Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka perlu disusun sebuah media pertanggungjawaban dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Jenderal



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi pencapaian kinerja. Selain itu, Laporan Kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan secara transparan dan aktual. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana Inspektorat Jenderal Kementerian LHK sebagai unsur penyelenggara pemerintah berkewajiban menyusun dan menyampaikan laporan kinerja yang terintegrasi dengan laporan keuangan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud penyusunan laporan kinerja adalah untuk menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan pada tahun 2019 sesuai arah kebijakan dan program yang telah ditetapkan, serta memberikan informasi kepada para pihak tentang keberhasilan dan kegagalan dengan penekanan pada efisiensi, efektifitas dan kualitas hasil kerja.

2. Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja adalah menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran selama tahun 2019. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan suatu simpulan yang menjadi bahan masukan dan referensi dalam menetapkan kebijakan dan strategi tahun berikutnya.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup laporan kinerja Inspektorat Jenderal adalah penyelenggaraan pengawasan di lingkungan Kementerian LHK berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MenLHK-Setjen/2015 tentang Penyelenggaraan pengawasan intern lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Bahwa sebagai pelaksanaan dari penyelenggaraan pengawasan lingkup Kementerian LHK, maka disusunlah Peraturan Inspektur Jenderal Nomor P.04/ITJEN/SETITJEN/OTL/12/2017 tentang Petunjuk pelaksanaan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dengan berbasis resiko serta ketersediaan SDM dan anggaran Inspektorat Jenderal melaksanakan pengawasan audit kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi pada 145 satker lingkup Kementerian LHK di tahun 2019 dari jumlah satker sebanyak 267. Pelaksanaan audit kinerja tersebut dilaksanakan oleh masing-masing Inspektorat Wilayah lingkup Inspektorat Jenderal dengan rincian sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Jumlah Satker
1	Inspektorat Wilayah I	
	Audit Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	40 Satker
2	Inspektorat Wilayah II	
	Audit Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	35 Satker
3	Inspektorat Wilayah III	
	Audit Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	38 Satker
4	Inspektorat Wilayah IV	
	Audit Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	32 Satker

D. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tanggal 14 April 2015, Inspektorat Jenderal mengemban tugas pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian LHK.

FUNGSI INSPEKTORAT JENDERAL :

- a. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- b. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.


E. Struktur Organisasi

Gambar 1. Wilayah Kerja Inspektorat Jenderal



Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut Inspektorat Jenderal terdiri atas Inspektorat Wilayah I, Inspektorat Wilayah II, Inspektorat Wilayah III, Inspektorat Wilayah IV, Inspektorat Investigasi dan Sekretariat Inspektorat Jenderal dengan tugas pokok sebagai berikut :

Inspektorat Wilayah I melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan, dan administrasi melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu termasuk pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus atas tugas pembantuan dan dana alokasi khusus pada unit-unit kerja Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, dan Pusat Pembangunan Ekoregion Sumatera serta instansi lingkungan hidup dan Kehutanan di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung.



Inspektorat Wilayah II melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan, dan administrasi melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu termasuk pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus atas tugas pembantuan dan dana alokasi khusus pada unit-unit Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, Direktorat Jenderal perhutanan Sosial dan Kemitraan lingkungan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa dan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali Nusa Tenggara serta instansi lingkungan hidup dan kehutanan di Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Jogjakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

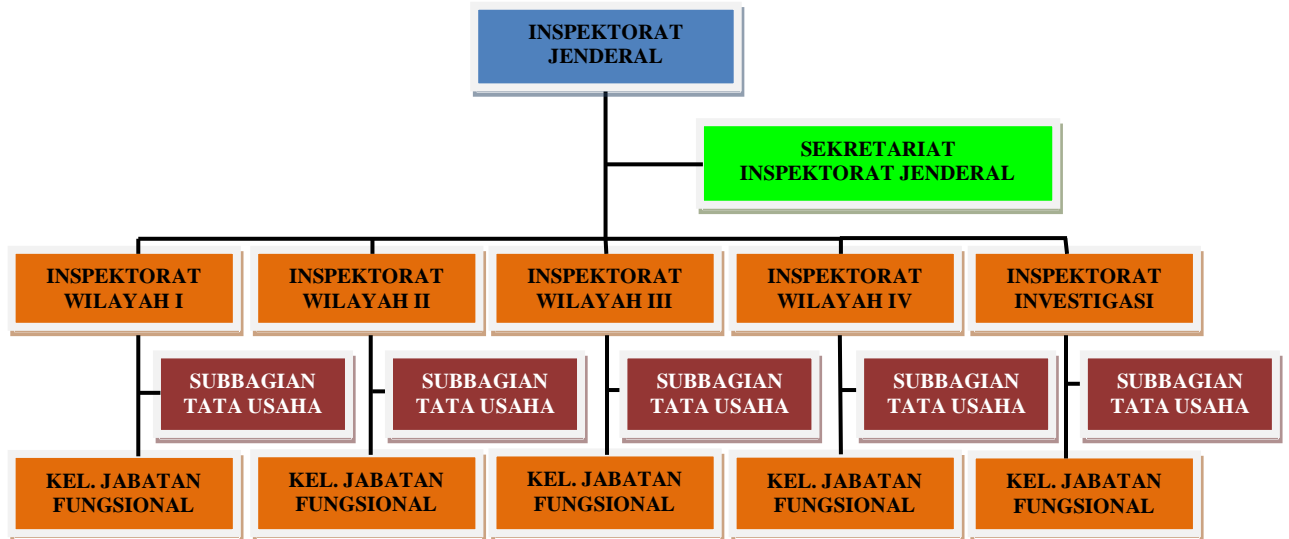
Inspektorat Wilayah III melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan, dan administrasi melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu termasuk pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus atas tugas pembantuan dan dana alokasi khusus pada Unit Kerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua, serta instansi lingkungan hidup dan kehutanan di Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Inspektorat Wilayah IV melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan, dan administrasi melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu termasuk pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus atas tugas pembantuan dan dana alokasi khusus pada Unit Kerja Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, instansi di lingkungan Kementerian LHK yang menerapkan Badan Layanan Umum, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi dan Maluku, serta instansi lingkungan hidup dan kehutanan di Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku, dan Provinsi Maluku Utara

Inspektorat Investigasi mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pengumpulan bahan meneliti, menganalisis, dan mengevaluasi atas kasus pelanggaran yang berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, menindak lanjuti pengaduan masyarakat, serta melaksanakan tugas lain berdasarkan instruksi khusus Menteri, dan cakupan yang ditetapkan oleh Inspektur Jenderal

Secara umum, struktur organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian LHK dapat disajikan sebagaimana Gambar 2 dan Gambar 3 di bawah ini.

Gambar 2. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal



Gambar 3. Struktur Organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal



F. Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Inspektorat Jenderal didukung oleh 241 pegawai PNS dan honorer yang terdiri dari 23 orang Pejabat Struktural, 115 Jabatan fungsional auditor, 59 orang Jabatan fungsional umum dan arsiparis, 3 orang Jabatan fungsional pranata komputer. Dengan sebaran pegawai di setiap unit kerja sebagai berikut :

Tabel 1. Sebaran Pegawai PNS Inspektorat Jenderal Tahun 2019

No.	Nama Jabatan	Setitjen	Itwl I	Itwil II	Itwil III	Itwil IV	Itves	Jumlah
1.	Pejabat Struktural Eselon I s.d IV	13	2	2	2	2	2	23
2.	Jabatan Fungsional Umum	42	3	2	2	3	5	57
3.	Jabatan Fungsional Arsiparis	2	0	0	0	0	0	2
4.	Jabatan Fungsional Pranata Komputer	3	0	0	0	0	0	3
5.	Jabatan Fungsional Auditor:	0	26	21	24	23	21	115
	Auditor Utama	0	1	0	0	0	0	1
	Auditor Madya	0	5	5	7	7	5	29
	Auditor Muda	0	8	10	12	6	9	45
	Auditor Pertama	0	8	3	5	7	3	26
	Auditor Penyelia	0	0	2	0	1	0	3
	Auditor Pelaksana Lanjutan	0	3	1	0	2	4	10
	Auditor Pelaksana	0	1	0	0	0	0	1
	Calon Auditor	0	3	2	2	1	1	9
	Jumlah PNS	60	34	27	30	29	29	209

G. Sumber Daya Anggaran

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Inspektorat Jenderal mendapat alokasi anggaran Tahun 2019 sebesar Rp86.837.312.000,00 dengan uraian pembagian anggaran sesuai jenis belanja sebagai berikut :

Tabel 2 Anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2019 Per Jenis Belanja

JENIS BELANJA	PAGU
	(x Rp.1.000)
Belanja Pegawai	28.010.767
Belanja Barang	52.507.545
a. Operasional	5.451.002
b. Non Operasional	47.056.543
Belanja Modal	6.319.000
JUMLAH	86.837.312

Tabel 3 Perbandingan Anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2019 dengan Tahun 2018

JENIS BELANJA	PAGU	
	(x Rp.1.000)	
	Tahun 2018	Tahun 2019
Belanja Pegawai	29,265,635	28.010.767
Belanja Barang	34,761,091	52.507.545
c. Operasional	3,445,963	5.451.002
d. Non Operasional	31,315,128	47.056.543
Belanja Modal	943,799	6.319.000
JUMLAH	64,970,525	86.837.312

H. Sistematika Penyajian

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Ruang Lingkup
- D. Tugas dan Fungsi
- E. Struktur Organisasi
- F. Sumber Daya Manuasi
- G. Sumber Daya Anggaran
- H. Sistematika Penyajian

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis Kementerian LHK Tahun 2015-2019
- B. Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2018

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja
- B. Realisasi Anggaran

BAB IV. PENUTUP

- A. Simpulan
- B. Hal-hal Yang Perlu Diperhatikan
- C. Langkah-langkah di Masa Mendatang

LAMPIRAN



Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Perkotaan
1. Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Perkotaan
2. Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Perkotaan
3. Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Perkotaan
4. Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Perkotaan
5. Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Perkotaan
6. Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Perkotaan

Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Perkotaan
1. Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Perkotaan
2. Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Perkotaan
3. Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Perkotaan
4. Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Perkotaan
5. Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Perkotaan
6. Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Perkotaan

KEMENTERIAN PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERENCANAAN
MAYORITAS PARLISIPASI TANI, KEBUDAYAAN, DAN PERENCANAAN
11th, Cipinang, Jakarta, 21 Januari 2014

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Kementerian LHK Tahun 2015-2019

Presiden Republik Indonesia telah mengarahkan visi dan misi pembangunan Tahun 2015-2019 yang dijadikan peta jalan seluruh kementerian dalam merancang arah pembangunan, sasaran dan strategis yang akan dilaksanakannya. Berangkat dari hal tersebut maka Kementerian LHK menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan prioritas utama pembangunan nasional maupun sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Untuk mencapai peran pembangunan tersebut Kementerian LHK merumuskan sasaran strategis pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang hendak dicapai yaitu :

1. Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja utama Indeks kualitas lingkungan hidup berada pada kisaran 66,5 – 68,5.
2. Memanfaatkan potensi sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dengan indikator kinerja utama peningkatan kontribusi sumberdaya hutan dan lingkungan hidup terhadap penerimaan devisa dan PNBP sebagai masukan terhadap PDB Nasional.
3. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan indikator kinerja utama derajat keseimbangan ekosistem meningkat setiap tahun.

Ketiga sasaran strategis Kementerian LHK tersebut di dukung melalui 13 program yaitu :

1. Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
2. Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung;
3. Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan;
4. Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan;
5. Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM;
6. Program Pengendalian Perubahan Iklim;
7. Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
8. Program Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Program Planologi dan Tata Lingkungan;
10. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
11. Program Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3;
12. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
13. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK.

Dari ketiga belas Program tersebut salah satunya adalah Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menjadi tanggungjawab Inspektorat Jenderal. Dalam rangka mendukung program yang hendak dicapai, ditetapkan Sasaran program pengawasan yang berkualitas dan peningkatan akuntabilitas aparatur bidang lingkungan hidup dan kehutanan dengan Indikator Kinerja Program yang tertuang dalam Renstra Inspektorat Jenderal yang telah ditetapkan melalui Peraturan Inspektur Jenderal Nomor P.05/Itjen-Setitjen/2015 tentang Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2015– 2019 sebagai berikut :

Tabel 4 Indikator Kinerja Program Dalam Renstra 2015-2019

Sasaran Program					
Pengawasan yang Berkualitas dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang LHK					
Indikator Kinerja Program	Target				
	2015	2016	2017	2018	2019
1. Tingkat Kapabilitas APIP KLHK	Level 1	Level 1	Level 2	Level 2	Level 3
2. Tingkat Kematangan Implementasi SPIP	Level 1	Level 1	Level 2	Level 2	Level 3
3. Nilai SAKIP Kementerian	Nilai B	Nilai B	Nilai B	Nilai A	Nilai A

Dari indikator kinerja program tersebut di uraikan langkah-langkah pencapaiannya di setiap kegiatan sebagai indikator kinerja kegiatan yaitu :

Tabel 5 Indikator Kinerja Kegiatan Dalam Renstra 2015-2019

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
1. Pengawasan internal yang berkualitas	Berkurangnya Jumlah Satker dengan Temuan Berulangnya	3 Satker	3 Satker	3 Satker	3 Satker	3 Satker
2. Mempertahankan Opini WTP	Maksimum temuan Kerugian Negara (APBN) hasil pemeriksaan BPK-RI (rata-rata lima tahun terakhir)	Rp 3,1 M	Rp 3,1 M	Rp 3,1 M	Rp 3,1 M	Rp 3,1 M
3. Peningkatan nilai implementasi SAKIP	Tercapainya Nilai Akuntabilitas Kinerja Eselon I	70 point	72 point	74 point	76 point	78 point
4. Pengawasan kasus yang berindikasi KKN	Jumlah kasus yang diselesaikan melalui penawasan investigatif	20 Kasus	20 Kasus	20 Kasus	20 Kasus	20 Kasus
5. Penanganan pengaduan masyarakat	Jumlah pengaduan masyarakat (Dumas) yang diselesaikan	20 Dumas	20 Dumas	20 Dumas	20 Dumas	20 Dumas
6. Pengembangan unit kerja menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)	Jumlah rekomendasi unit kerja berpredikat WBK (3 Satker/Tahun)	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi
7. Penyelesaian tindak lanjut hasil audit	Meningkatnya penyelessaian tindak lanjut yang tuntas hasil audit internal	2.500 saran	3.000 saran	3.500 saran	4.000 saran	4.500 saran
8. Teselenggaranya sistem pengendalian intern di Satker lingkup Kementerian LHK	Tingkat Kematangan Implementasi SPIP	Level 1	Level 1	Level 2	Level 2	Level 3
9. Mendukung kegiatan tugas teknis Itjen	Nilai Implementasi SAKIP Itjen	70 point	72 point	74 point	76 point	78 point
	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 1	Level 1	Level 2	Level 2	Level 3

B. Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2019

Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal merupakan komitmen Inspektur Jenderal dengan Menteri yang ditandatangani bulan Desember 2018 untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan target yang ditetapkan. Adapun Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 6 Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2019

Sasaran Program	
Pengawasan yang Berkualitas dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang LHK	
Indikator Kinerja Program	Target
Tingkat kapabilitas APIP Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Level 3
Kematangan Implementasi SPIP	Level 3
Nilai SAKIP Kementerian	Nilai BB

Indikator Kinerja Program (IKP) tersebut dijabarkan menjadi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang menjadi tanggungjawab Pejabat Eselon II lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian LHK. IKK tersebut terdiri dari :

IKK Lingkup Inspektorat Jenderal

1. Berkurangnya jumlah Satker dengan temuan berulang;
2. Maksimum temuan Kerugian Negara (APBN) hasil pemeriksaan BPK-RI (rata-rata lima tahun terakhir);
3. Tercapainya nilai akuntabilitas kinerja Eselon I;
4. Jumlah kasus yang diselesaikan melalui pengawasan investigatif;
5. Jumlah pengaduan masyarakat (Dumas) yang diselesaikan;
6. Jumlah rekomendasi unit kerja yang WBK (3 satker/tahun);
7. Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut yang tuntas hasil audit internal;
8. Tingkat kematangan implementasi SPIP;
9. Nilai Implementasi SAKIP Itjen;
10. Tingkat kapabilitas APIP.

Perjanjian kinerja tahun 2019 Pejabat Eselon II lingkup Inspektorat dengan Inspektur Jenderal adalah sebagai berikut :

Tabel 7 Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Jenderal Kementerian LHK Tahun 2019

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahun 2019
1. Pengawasan internal yang berkualitas	Berkurangnya Jumlah Satker dengan Temuan Berulangannya	3 Satker
2. Mempertahankan Opini WTP	Maksimun temuan Kerugian Negara (APBN) hasil pemeriksaan BPK-RI (rata-rata lima tahun terakhir)	Rp 3,1 M
3. Peningkatan nilai implementasi SAKIP	Tercapainya Nilai Akuntabilitas Kinerja Eselon I	78 point
4. Pengawasan kasus yang berindikasi KKN	Jumlah kasus yang diselesaikan melalui penawasan investigatif	20 Kasus
5. Penanganan pengaduan masyarakat	Jumlah pengaduan masyarakat (Dumas) yang diselesaikan	20 Dumas
6. Pengembangan unit kerja menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)	Jumlah rekomendasi unit kerja berpredikat WBK (3 Satker/Tahun)	5 Rekomendasi
7. Penyelesaian tindak lanjut hasil audit	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut yang tuntas hasil audit internal	4.000 saran
8. Teselenggaranya sistem pengendalian intern di Satker lingkup Kementerian LHK	Tingkat Kematangan Implementasi SPIP	Level 3
9. Mendukung kegiatan tugas teknis Itjen	Nilai Implementasi SAKIP Itjen	78 point
	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3



BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk melihat capaian kinerja Inspektorat Jenderal pada tahun 2019 yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, maka dilakukan pengukuran dan analisis capaian kinerja.

Metode pengukuran kinerja menggunakan formula sederhana yaitu menentukan persentase pencapaian kinerja. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya. Secara keseluruhan capaian kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian LHK Tahun 2019 dinyatakan “berhasil”, yaitu tercapai 100% dari target yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja program Inspektorat Jenderal tercapai dengan melakukan penilaian mandiri untuk kematangan implementasi SPIP dan tingkat kapabilitas APIP. Inspektorat Jenderal juga melaksanakan kegiatan evaluasi SAKIP masing-masing eselon I. Kegiatan tersebut menjadi tolak ukur keberhasilan Inspektorat Jenderal dalam mencapai target yang telah ditetapkan.



Gambar 4. Inspektorat Jenderal Menyelenggarakan Workshop APIP 2019

1. PENGUKURAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM INSPEKTORAT JENDERAL

Capaian kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian LHK Tahun 2019 berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja program dibandingkan dengan target dalam perjanjian kinerja sebagai berikut :

Tabel 8. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Program Inspektorat Jenderal Kementerian LHK Tahun 2019

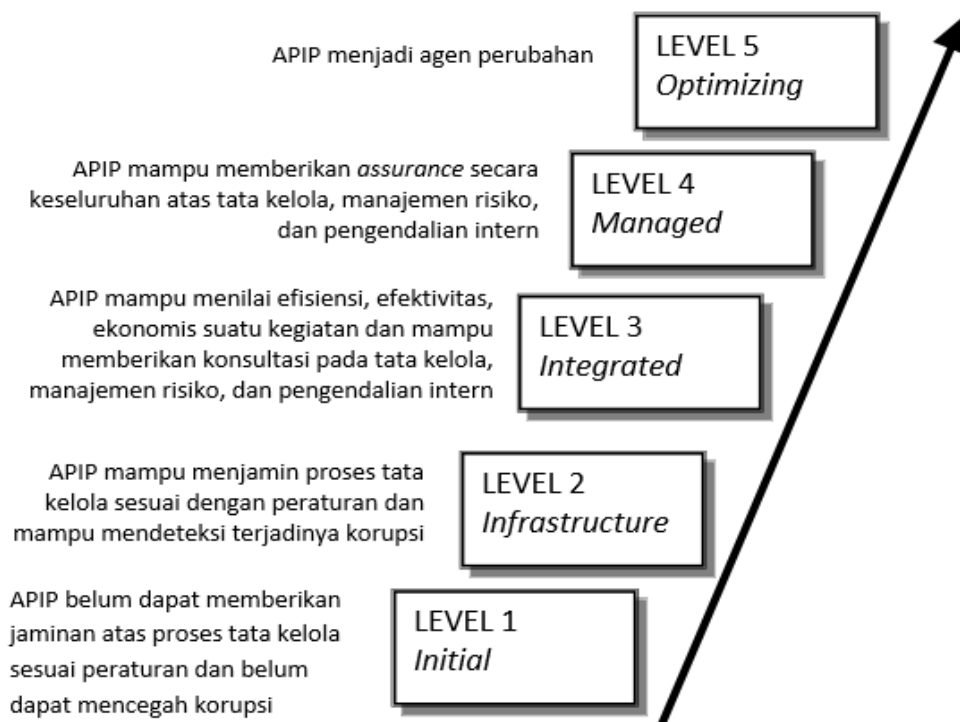
Sasaran Program			
Pengawasan yang Berkualitas dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang LHK			
Indikator Kinerja Program	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Capaian Kinerja (%)
Tingkat kapabilitas APIP Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Level 3	Level 3	100%
Kematangan Implementasi SPIP	Level 3	Level 3	100%
Nilai SAKIP Kementerian	Nilai BB	Nilai BB**	100%

* Nilai SAKIP Kementerian LHK Tahun 2019 merupakan hasil Evaluasi Implementasi SAKIP oleh Inspektorat Jenderal Kementerian LHK. Nilai SAKIP Kementerian LHK masih menunggu hasil evaluasi oleh Kementerian PAN dan RB.

a. Indikator Kinerja Program Tingkat Kapabilitas APIP

Dalam rangka mewujudkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang mampu melaksanakan peran yang memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan tata kelola Kementerian LHK, maka dilaksanakan peningkatan kapabilitas APIP yang memadai.

Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal Kementerian LHK ditargetkan mencapai level 3 pada Tahun 2019 yaitu pada level *Integrated* (APIP menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern) dengan Kerangka yang ditetapkan *Internal Audit Capability Model* (IACM) atau Peraturan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor Per-1633/K/JF/2011 tanggal 27 Desember 2011 sebagaimana berikut :





Gambar 5. Kunjungan Kerja Inspektorat Jenderal Ke Inspektorat Jenderal Kementerian

1) Capaian

a) Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Tahun 2019

Dasar pelaksanaan peningkatan kapabilitas APIP secara mandiri adalah sebagai berikut :

- (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- (2) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
- (3) Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara;
- (4) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
- (5) Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- (6) Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.10/Itjen/Setitjen/Kum.1/02/2019 tanggal 27 Februari 2019 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Peningkatan Kapabilitas Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah Lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pelaksanaan penilaian kapabilitas APIP menggunakan metode *Internal Audit Capability Model* (IACM) sebagaimana dikembangkan oleh *Institute of Internal Auditors (IIA)* yaitu suatu kerangka kerja yang mengidentifikasi aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan untuk pengawasan intern yang efektif di sektor publik. IACM menggambarkan jalur evolusi untuk organisasi sektor publik dalam mengembangkan pengawasan intern yang efektif untuk memenuhi persyaratan tata kelola organisasi dan harapan profesional. IACM menunjukkan langkah-langkah untuk maju dari tingkat pengawasan intern yang kurang kuat menuju kondisi yang kuat dan efektif.

Hasil penilaian mandiri (*self assessment*) kapabilitas APIP Kementerian LHK Tahun 2019 telah mencapai level 3 penuh, dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 9 Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Kementerian LHK Tahun 2019

No.	Elemen	Jumlah Pernyataan	Jumlah Jawaban			Level
			Ya	Sebagian	Tidak	
1.	Peran dan Layanan APIP	5	2	2	1	3
2.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia APIP	14	6	6	2	3
3.	Praktik Profesional APIP	4	1	3	0	3
4.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja APIP	9	6	3	0	3
5.	Budaya dan Hubungan Kerja APIP	7	4	3	0	3
6.	Struktur Tata Kelola APIP	8	2	1	5	3
Hasil Akhir		47	21	18	8	3

b) Hasil *Quality Assurance* (penjaminan kualitas) oleh BPKP

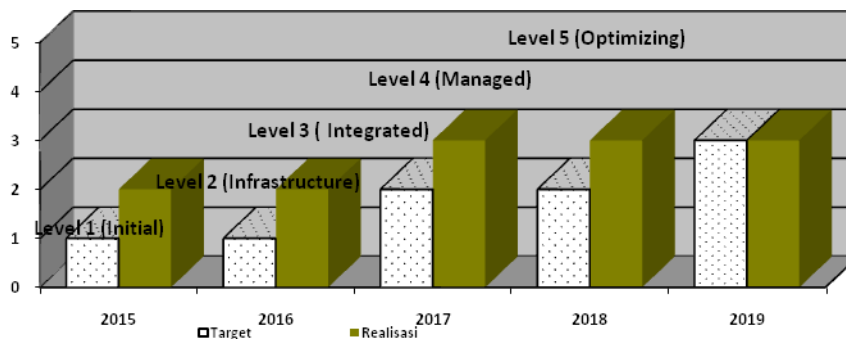
Dalam rangka penilaian tingkat kapabilitas APIP (Inspektorat Jenderal Kementerian LHK) tahun 2019, BPKP telah melaksanakan *quality assurance* (Penjaminan Kualitas) berdasarkan Surat Tugas Kepala BPKP nomor SP-130/D1/2019 tanggal 31 Desember 2019. Hasil dari penilaian kualitas tersebut kapabilitas APIP berada pada level 3 penuh (*Integrated*) atau mencapai 100% dari target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja.

Hasil *Quality Assurance* tingkat kapabilitas APIP Kementerian LHK Tahun 2019, dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 10 Hasil *Quality Assurance* tingkat kapabilitas APIP Kementerian LHK Tahun 2019

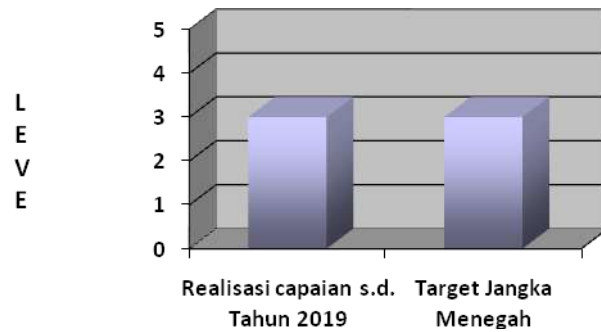
No.	Elemen	KPA	Indikator	Ya	Sbgn	Tdk	Level
1.	Peran dan Layanan	Audit Kinerja/Program Evaluasi	10	6	-	-	3
		Layanan Konsultasi		4	-	-	
2.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Koordinasi Tim	20	3	-	-	3
		Pegawai Kualifikasi Profesional		9	-	-	
		Membangun Tim & Kompetensi		8	-	-	
3.	Praktik Profesional	Perencanaan ABR	17	10	-	-	3
		Kualitas Kerangka Kerja Manajemen		7	-	-	
4.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	Pelaporan Manajemen APIP	19	6	-	-	3
		Informasi Biaya		5	-	-	
		Pengukuran Kinerja		8	-	-	
5.	Budaya dan Hubungan Organisasi	Komponen Manajemen Tim Yang Integral	14	9	-	-	3
		Koordinasi dengan Pihak Lain		5	-	-	
6.	Struktur Tata Kelola	Mekanisme Pendanaan	13	5	-	-	3
		Pengawasan Manajemen APIP		8	-	-	
TOTAL			93	93	-	-	3

Untuk melihat perkembangan capaian tingkat Kapabilitas APIP tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 tergambar sebagai berikut :



Gambar 6. Capaian Tingkat Kapabilitas APIP Kementerian LHK Tahun 2015 s.d. 2019

Jika dibandingkan realisasi tingkat kapabilitas APIP sampai dengan tahun 2019 dengan target jangka menengah tergambar sebagai berikut :



Gambar 7. Perbandingan Realisasi Tingkat Kapabilitas APIP Tahun 2019 dengan Target Jangka Menengah

2) Faktor Keberhasilan

- Adanya komitmen pimpinan dalam mengawal upaya peningkatan Kapabilitas APIP Kementerian LHK;
- Terbangunnya kerjasama yang baik antara Inspektorat Jenderal dengan BPKP dan AAIP dalam upaya peningkatan kapabilitas APIP Kementerian LHK;
- Peningkatan kompetensi APIP melalui diklat subtransi pengawasan;
- Telah dilakukan *assessment* terhadap seluruh auditor Inspektorat Jenderal Kementerian LHK
- Terlaksananya *consulting activities* terhadap auditi, pendampingan atas penyusunan Laporan Keuangan dan pendampingan pemeriksaan BPK RI serta sosialisasi peraturan-peraturan.

3) Perbandingan Capaian Tahun 2019 dengan 2018

Capaian kinerja peningkatan kapabilitas APIP tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018 sepertinya tidak terdapat peningkatan, sesungguhnya tim QA BPKP juga melakukan penilaian kapabilitas APIP menuju level 4 hasil dari penilaian mandiri Inspektorat Jenderal Kementerian LHK. Hasil QA menuju level 4 tersebut diperoleh 6 pernyataan bernilai Ya, 20 pernyataan bernilai sebagian dan 8 pernyataan bernilai Tidak dari 47 pernyataan dalam 6 elemen penilaian, dengan rincian sebagaimana table berikut :

Perbandingan Hasil Penilaian Mandiri dan QA Kapabilitas APIP KLHK oleh BPKP Semester I dan II Tahun 2019 Menuju Level 4

No.	Elemen	Jumlah Pernyataan Level 4	Hasil PM Semester I			Semester II			Hasil QA Tahun 2019			Kesimpulan Level
			Ya	Sebagian	Tidak	Ya	Sebagian	Tidak	Ya	Sebagian	Tidak	
1.	Peran dan Layanan APIP	5	2	2	1	2	2	1	0	4	1	3
2.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia APIP	14	2	7	5	6	6	2	1	10	3	3
3.	Praktik Profesional APIP	4	0	3	1	1	3	0	0	4	0	3
4.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja APIP	9	2	2	0	2	3	0	5	4	0	3
5.	Budaya dan Hubungan Kerja APIP	7	2	5	0	4	1	0	0	7	0	3
6.	Struktur Tata Kelola APIP	8	2	1	5	2	1	5	0	0	8	3
Hasil Akhir		47	15	20	12	21	18	8	6	29	12	3

berdasarkan hasil QA kapabilitas APIP tahun 2019 tersebut sesungguhnya terlihat peningkatan kinerja dari tahun 2018.

b. Indikator Tingkat Kematangan (Maturitas) Implementasi SPIP

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengendalian intern tersebut bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Karakteristik tingkat kematangan SPIP terdiri dari 5 (lima) tingkat, yaitu 0 (belum ada), 1 (rintisan), 2 (berkembang), 3 (terdefinisi), 4 (terkelola dan terukur) dan 5 (optimum), karakteristik tersebut mengacu pada SK Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan daerah selaku penanggung jawab Satgas SPIP Nomor S.354/sat PP SPIP/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Pedoman penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP.

Tingkat kematangan SPIP mengacu pada :

- a) Peraturan Kepala BPKP Nomor: Per-690/K/D4/2011 Tentang Pedoman Pemantauan Perkembangan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- b) SK Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan daerah selaku penanggung jawab satgas SPIP Nomor S.354/sat PP SPIP/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Pedoman Penilaian Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP.



Gambar 8. Sosialisasi dan Bimtek SPIP di BTN Komodo

Masing-masing karakteristik SPIP sesuai tingkatnya ditunjukkan pada table berikut ini :

Tabel 11 Matrik Tingkat Kematangan SPIP

Karateristik Tingkat Kematangan / Maturitas Implementasi SPIP	
Tingkat	Karateristik SPIP
0 (Belum Ada)	K/L/Pemda sama sekali belum memiliki kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk melaksanakan praktek-praktek pengendalian intern.
1 (Rintisan)	K/L/Pemda telah melaksanakan praktik pengendalian intern, namun pendekatan risiko dan pengendalian yang diperlukan masih bersifat ad-hoc dan tidak terorganisasi dengan baik, tanpa komunikasi dan pemantauan sehingga kelemahan tidak diidentifikasi.
2 (Berkembang)	K/L/Pemda telah melaksanakan praktik pengendalian intern, namun tidak terdokumentasi dengan baik dan pelaksanaannya sangat tergantung pada individu dan belum melibatkan semua unit organisasi. Efektivitas pengendalian belum dievaluasi sehingga banyak terjadi kelemahan yang belum ditangani secara memadai.
3 (Terdefinisi)	K/L/Pemda telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai.
4 (Terkelola dan Terukur)	K/L/Pemda telah menerapkan pengendalian internal yang efektif, masing-masing personel pelaksana kegiatan yang selalu mengendalikan kegiatan pada pencapaian tujuan kegiatan itu sendiri maupun tujuan K/L/Pemda. Evaluasi formal dan terdokumentasi.
5 (Optimum)	K/L/Pemda telah menerapkan pengendalian intern yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh pemantauan otomatis menggunakan aplikasi komputer.

Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah bertanggung jawab terhadap pembinaan penyelenggaraan SPIP pada seluruh Satker lingkup Kementerian LHK. Hal tersebut sejalan dengan target Indikator Kinerja Program (IKP) Inspektorat Jenderal mencapai level 3 (terdefinisi) pada tahun 2019.

1) Capaian

a) Penilaian Mandiri Maturitas SPIP

Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah bertanggung jawab terhadap pembinaan penyelenggaraan SPIP pada seluruh Satker lingkup Kementerian LHK. Hal tersebut sejalan dengan target Indikator Kinerja Program (IKP) Inspektorat Jenderal dalam Rencana Strategis tahun 2015–2019, yaitu meningkatkan maturitas/ kematangan Implementasi SPIP Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencapai level 3 pada tahun 2019.

Untuk mencapai target IKP tersebut, maka Inspektorat Jenderal melaksanakan penilaian mandiri maturitas SPIP lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan tujuan mengetahui tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP pada masing-masing Unit Eselon I sebagai dasar untuk menentukan level maturitas SPIP tingkat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hasil penilaian mandiri maturitas SPIP yang dilakukan oleh Kementerian LHK Tahun 2019 adalah sebesar 4.00 atau mencapai level 4 dengan kategori terkelola dan terukur.

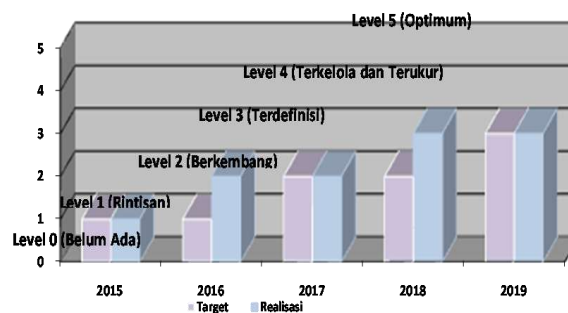
Tabel 12 Rincian hasil penilaian mandiri maturitas SPIP tingkat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	Fokus Penilaian	Skor	Nilai	Tingkat
I.	Unsur Lingkungan Pengendalian			
1	Penegakan Integritas dan Penegakan Etika	0.15	4	Terkelola dan Terukur
2	Komitmen Terhadap Kompetensi	0.15	4	Terkelola dan Terukur
3	Kepemimpinan yang Kondusif	0.15	4	Terkelola dan Terukur
4	Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan	0.15	4	Terkelola dan Terukur
5	Delegasi Wewenang dan Tanggung Jawab	0.15	4	Terkelola dan Terukur
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	0.15	4	Terdefinisi
7	Peran APIP Terhadap Efektivitas SPIP	0.15	4	Terkelola dan Terukur
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	0.15	4	Terkelola dan Terukur
II.	Penilaian Risiko			
1	Identifikasi Risiko	0.4	4	Terkelola dan Terukur
2	Analisis Risiko	0.4	4	Terkelola dan Terukur
III.	Unsur Kegiatan Pengendalian			
1	Reviu Kinerja	0.091	4	Terkelola dan Terukur
2	Pembinaan SDM	0.091	4	Terkelola dan Terukur
3	Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi	0.091	4	Terkelola dan Terukur
4	Pengendalian Fisik atas Aset	0.091	4	Terkelola dan Terukur
5	Penetapan dan Reviu Indikator Kinerja	0.091	4	Terkelola dan Terukur
6	Pemisahan Fungsi	0.091	4	Terkelola dan Terukur
7	Otorisasi Transaksi	0.091	4	Terkelola dan Terukur
8	Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu	0.091	4	Terkelola dan Terukur
9	Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Catatan	0.091	4	Terkelola dan Terukur
10	Akuntabilitas Pencatatan dan Sumber Daya	0.091	4	Terkelola dan Terukur
11	Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) serta transaksi dan kejadian penting	0.091	4	Terkelola dan Terukur
IV.	Unsur Informasi dan Komunikasi			
1	Informasi yang Relevan	0.2	4	Terkelola dan Terukur
2	Komunikasi yang Efektif	0.2	4	Terkelola dan Terukur
No.	Fokus Penilaian	Skor	Nilai	Tingkat
V.	Unsur Pemantauan			
1	Pemantauan Berkelanjutan	0.3	4	Terkelola dan Terukur
2	Evaluasi Terpisah	0.3	4	Terkelola dan Terukur
Jumlah Skor		4	TERKELOLA DAN TERUKUR	

b) Penilaian Maturitas SPIP Kementerian LHK oleh BPKP

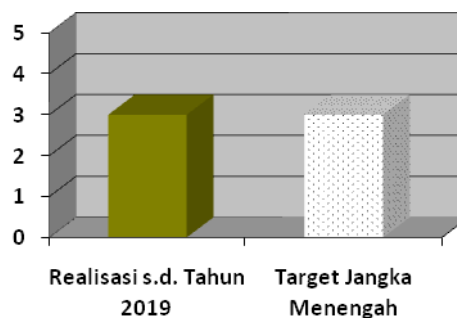
Berdasarkan Laporan Hasil Penjaminan Kualitas Atas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Tahun 2019 pada Kementerian LHK nomor LHV-224/D102/2/2019 tanggal 31 Desember 2019 didapat hasil penilaian sebesar 3,134 dengan demikian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian LHK tahun 2019 berada pada level 3 dengan kategori “terdefinisi” atau 100% tercapai dari target.

Untuk melihat pencapaian tingkat kematangan implementasi SPIP tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 tergambar sebagai berikut :



Gambar 9. Capaian Tingkat Kematangan Implementasi SPIP Kementerian LHK Tahun 2015 s.d. 2019

Nilai kematangan implementasi SPIP Kementerian LHK mengalami perkembangan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, dan jika dibandingkan dengan target jangka menengah, realisasi kinerja tersebut mencapai target jangka menengah. Sebagaimana tergambar sebagai berikut :



Gambar 10. Perbandingan Realisasi Capaian Kematangan Implementasi SPIP Tahun 2019 dengan Target Jangka Menengah

2) Faktor Keberhasilan :

- a) Terbangunnya komitmen pimpinan dan seluruh pegawai Inspektorat Jenderal Kementerian LHK terhadap penyelenggaraan SPIP.
- b) Terbangunnya kerjasama yang baik antara Inspektorat Jenderal dengan BPKP dalam upaya peningkatan penyelenggaraan SPIP;
- c) Terlaksananya sosialisasi/pembinaan, pendampingan dan pemantauan terkait penyelenggaraan SPIP pada satker lingkup Kementerian LHK;
- d) Terselenggaranya Diklat Penilaian Maturitas SPIP dengan Pusdiklatwas BPKP.

3) Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Capaian maturitas SPIP tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 0,0977 poin di bandingkan dengan nilai maturitas SPIP tahun 2018. Peningkatan capaian kinerja tersebut di sebabkan adanya beberapa kegiatan yang mendorong peningkatan implemmentasi SPIP, antara lain pemantaun penyelenggaraan SPIP pada Satker lingkup Kementerian LHK, Workshop SPIP dan penilaian mandiri maturitas SPIP.

Peningkatan maturitas SPIP dari level 3 ke level 4 terjadi pada 3 sub unsur, dengan demikian sampai dengan tahun 2019, terdapat 4 sub unsur yang telah mencapai level 4 penuh yaitu :

- a) Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan
- b) Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait
- c) Perwujudan Peran APIP yang Efektif
- d) Pembinaan Sumber Daya Manusia.

c. Indikator Nilai SAKIP Kementerian LHK

SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan secara berjenjang dengan tingkatan (1) entitas akuntabilitas kinerja Satker, (2) entitas akuntabilitas kinerja unit Eselon I dan (3) entitas akuntabilitas kinerja kementerian negara/lembaga.

Untuk mengevaluasi penyelenggaraan SAKIP pada entitas Satker dan unit eselon I dilakukan oleh Inspektorat Jenderal selaku pengawas intern pemerintah. Sedangkan evaluasi implementasi SAKIP tingkat kementerian negara/lembaga dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB.

Penilaian SAKIP mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 sebagaimana ditunjukkan pada Tabel dibawah ini.

Tabel 13. Matrik Nilai Evaluasi SAKIP

NILAI IMPLEMENTASI ATAS EVALUASI SAKIP			
No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90 -100	Sangat Memuaskan
2	A	>80 – 90	Memuaskan , Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3	BB	>70 – 80	Sangat Baik , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4	B	>60 – 70	Baik , Akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5	CC	>50 – 60	Cukup (Memadai) , Akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6	C	>30 - 50	Kurang , Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
7	D	0 - 30	Sangat Kurang , Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

1) Capaian

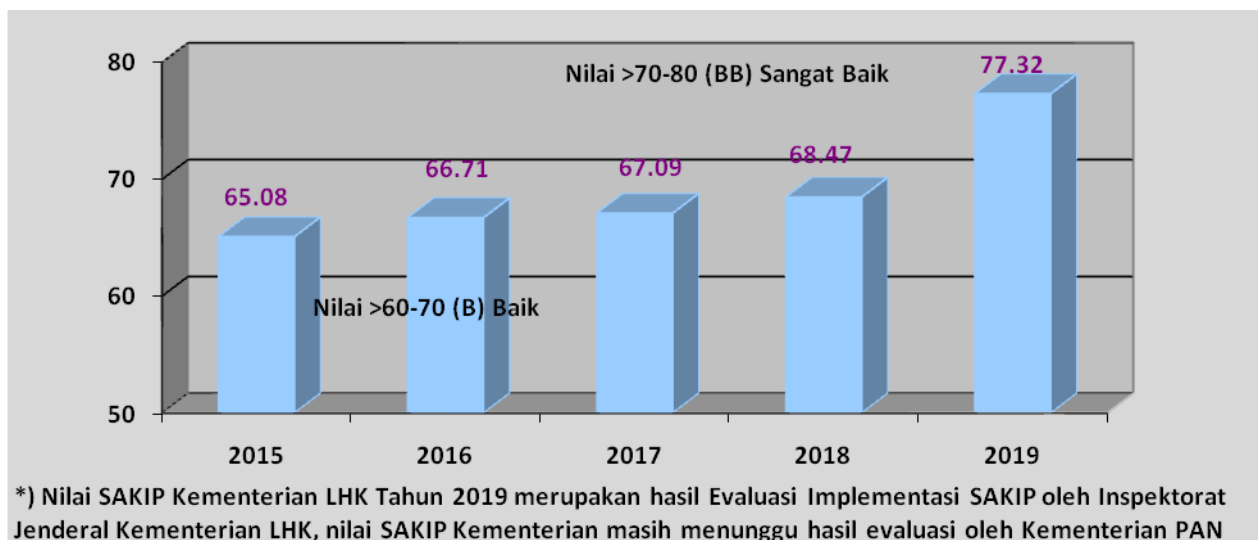
Target Nilai SAKIP Kementerian LHK tahun 2019 mendapat nilai BB dengan interpretasi sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang handal.

Berdasarkan evaluasi SAKIP pada masing-masing Eselon I lingkup Kementerian LHK yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal diperoleh nilai SAKIP Kementerian LHK sebesar 77,32 poin yang termasuk kategori BB (sangat baik).

Nilai implementasi SAKIP Kementerian LHK menunjukkan peningkatan skor dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Pada tahun 2018 tingkat akuntabilitas kinerja Kementerian LHK mencapai predikat B (baik) dengan nilai 68,47. Nilai tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil pada Kementerian LHK menunjukkan hasil yang cukup baik namun sangat perlu dilakukan perbaikan lebih lanjut.

Perkembangan nilai SAKIP Kementerian LHK sebagaimana tersaji pada gambar berikut :

Gambar 11. Capaian Nilai SAKIP Kementerian LHK Tahun 2015 s.d. 2019



Nilai implementasi SAKIP yang tersaji merupakan hasil evaluasi implementasi SAKIP oleh Inspektorat Jenderal Kementerian LHK karena sampai dengan disusunnya laporan ini, penilaian SAKIP Kementerian LHK Tahun 2019 belum disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

2. PENGUKURAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian LHK. Dalam melaksanakan tugas pengawasan di tahun 2019 Inspektorat Jenderal mendapat alokasi anggaran sebesar Rp86.837.312.000,00 berdasarkan DIPA nomor DIPA-029.02.1.426860/2019 tanggal 5 Desember 2018. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 14. Anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian LHK Tahun 2019

PROGRAM/ KEGIATAN POKOK	PAGU Rp (x1.000)
Inspektorat Jenderal	86.837.312
Inspektorat Wilayah I	5.213.440
Inspektorat Wilayah II	5.279.228
Inspektorat Wilayah III	6.104.075
Inspektorat Wilayah IV	5.602.160
Inspektorat Investigasi	5.410.920
Sekretariat Inspektorat Jenderal	59.227.489

Tabel 15. Perbandingan Anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2018 dengan 2019

PROGRAM/ KEGIATAN POKOK	PAGU Rp (x1.000)	
	Tahun 2018	Tahun 2019
Inspektorat Jenderal	64,970,525	86.837.312
Inspektorat Wilayah I	3,813,440	5.213.440
Inspektorat Wilayah II	3,679,228	5.279.228
Inspektorat Wilayah III	5,004,075	6.104.075
Inspektorat Wilayah IV	4,102,160	5.602.160
Inspektorat Investigasi	4,787,606	5.410.920
Sekretariat Inspektorat Jenderal	43,584,016	59.227.489

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal mencakup audit kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi, reviu LK, reviu RKA-K/L dan evaluasi SAKIP pada unit eselon I lingkup Kementerian LHK. Rincian kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian LHK pada tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 16. Rincian Kegiatan Audit Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Tahun 2019

No.	Kegiatan	Jumlah Satker
	Inspektorat Wilayah I	
1	Audit Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	40 Satker
	Inspektorat Wilayah II	
2	Audit Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	35 Satker
	Inspektorat Wilayah III	
3	Audit Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	38 Satker
	Inspektorat Wilayah IV	
4	Audit Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	32 Satker

Tabel 17. Rincian Kegiatan Reviu Tahun 2019

No	Kegiatan	Rencana Tahun 2019	LHR	
			Realisasi Tahun 2019	%
	Inspektorat Wilayah I			
1.	Reviu Desain SPIP Tahun 2019	3	3	100,00
2.	Reviu LK tahun 2018 tingkat UAPPA-E1 lingkup Kementerian LHK	3	3	100,00
3.	Reviu LK semester 1 tahun 2019 tingkat UAPPA-E1 lingkup Kementerian LHK	3	3	100,00
4.	Reviu Pengelolaan Anggaran Triwulan Tahun 2019	9	9	100,00
5.	Reviu RKA-K/L Tahun 2020 (Pagu Anggaran)	3	3	100,00
6.	Reviu RKA K/L Tahun 2020 (Alokasi Anggaran)	3	3	100,00
7.	Reviu RK BMN Tahun 2021	3	3	100,00
8.	Reviu Pengelolaan Anggaran s.d. November T.A. 2019	10	3	30,00
	Jumlah	37	30	81,08
	Inspektorat Wilayah II			
1.	Reviu Desain SPIP Tahun 2019	3	3	100,00
2.	Reviu LK tahun 2018 tingkat UAPPA-E1 lingkup Kementerian LHK	3	3	100,00
3.	Reviu LK semester 1 tahun 2019 tingkat UAPPA-E1 lingkup Kementerian LHK	3	3	100,00
4.	Reviu Pengelolaan Anggaran Triwulan Tahun 2019	9	9	100,00
5.	Reviu RKA-K/L Tahun 2020 (Pagu Anggaran)	3	3	100,00
6.	Reviu RKA K/L Tahun 2020 (Alokasi Anggaran)	3	3	100,00
7.	Reviu RK BMN Tahun 2021	3	3	100,00

No	Kegiatan	LHR		
		Rencana Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	%
8.	Reviu Pengelolaan Anggaran s.d. November T.A. 2019	3	0	0,00
Jumlah		30	27	90,00
Inspektorat Wilayah III				
1.	Reviu Desain SPIP Tahun 2019	6	6	100,00
2.	Reviu LK tahun 2018 tingkat UAPPA-E1 lingkup Kementerian LHK	4	4	100,00
3.	Reviu LK semester 1 tahun 2019 tingkat UAPPA-E1 lingkup Kementerian LHK	4	4	100,00
4.	Reviu Pengelolaan Anggaran Triwulan Tahun 2019	12	12	100,00
5.	Reviu RKA-K/L Tahun 2020 (Pagu Anggaran)	4	4	100,00
6.	Reviu RKA K/L Tahun 2020 (Alokasi Anggaran)	4	4	100,00
7.	Reviu RK BMN Tahun 2021	4	4	100,00
8.	Reviu Pengelolaan Anggaran s.d. November 2019	4	0	0,00
Jumlah		42	38	90,48
Inspektorat Wilayah IV				
1.	Reviu Desain SPIP Tahun 2019	3	3	100,00
2.	Reviu Pengelolaan Anggaran Triwulan IV Tahun 2018 Kementerian LHK	1	1	100,00
3.	Reviu LK tahun 2018 tingkat UAPPA-E1 lingkup Kementerian LHK	3	3	100,00
4.	Reviu LK tahun 2018 tingkat UAPPA Kementerian LHK	1	1	100,00
5.	Reviu LK tahun 2018BLU Pusat P2H	1	1	100,00
6.	Reviu Laporan Kinerja Kementerian LHK Tahun 2018	1	1	100,00
7.	Reviu LK semester 1 tahun 2019 tingkat UAPPA-E1 lingkup Kementerian LHK	3	3	100,00
8.	Reviu LK semester 1 tahun 2019 tingkat UAPPA Kementerian LHK	1	1	100,00
9.	Reviu LK semester 1 tahun 2019BLU Pusat P2H	1	1	100,00
10.	Reviu Pengelolaan Anggaran Triwulan Tahun 2019	9	9	100,00
11.	Reviu RKA-K/L Tahun 2020 (Pagu Anggaran)	3	3	100,00
12.	Reviu RKA K/L Tahun 2020 (Alokasi Anggaran)	3	3	100,00
13.	Reviu RK BMN Tahun 2021	3	3	100,00
14.	Reviu Pengelolaan Anggaran s.d. November T.A. 2019	8	0	0,00
Jumlah		41	33	80,49

Tabel 18. Rincian Kegiatan Pendampingan

No.	Kegiatan
1	Pendampingan Pemeriksaan BPK RI
2	Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan

Tabel 19. Kegiatan Pengawasan Investigatif

No.	Kegiatan	Jumlah
1.	Audit Investigatif	12
2.	Identifikasi Khusus	15

Adapun sumber data dan cara menghitung IKK ditunjukkan pada Tabel 16 di bawah ini.

Tabel 20. Metode Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan

No	IKK	Sumber Data	Cara Menghitung
1	Berkurangnya jumlah Satker dengan temuan berulang	Analisis LHA Itjen	Jumlah Satker yang tidak ada temuan berulangnya dengan LHA sebelumnya. - Dilihat dari substansinya
2	Maksimum Kerugian Negara (APBN) pemeriksaan BPK-RI (rata-rata lima tahun terakhir)	Analisis LHP BPK-RI terhadap Laporan Keuangan	Jumlah temuan kerugian Negara (APBN) menurut Eselon I pada wilayah kerja inspektorat masing masing.
3	Tercapainya akuntabilitas Eselon I	Analisis LHE SAKIP Eselon I	Nilai rata-rata SAKIP menurut Eselon I pada wilayah kerja Inspektorat masing masing.
4	Jumlah kasus yang diselesaikan melalui pengawasan investigatif	Surat tugas dan laporan hasil audit Investigasi dan Identifikasi Khusus	Jumlah Surat tugas dan laporan hasil audit Investigasi dan Identifikasi Khusus
5	Jumlah pengaduan masyarakat (Dumas) yang diselesaikan	Rekapitulasi penanganan pengaduan masyarakat	Jumlah pengaduan masyarakat yang telah ditindaklanjuti
6	Jumlah rekomendasi unit kerja yang WBK (3 satker/tahun)	Surat Rekomendasi Satker yang diusulkan WBK	Jumlah Satker yang direkomendasikan untuk diusulkan WBK
7	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut yang tuntas hasil audit internal	Laporan pemantauan tindak lanjut	Jumlah saran/rekomendasi temuan hasil audit Inspektorat Jenderal baik reguler maupun khusus/investigasi yang tuntas pada tahun berjalan
8	Tingkat kematangan implementasi SPIP	Penilaian dari BPKP atau Penilaian mandiri oleh Itjen	Hasil penilaian tim BPKP/tim Itjen (Mandiri) terhadap Tingkat kematangan implementasi SPIP lingkup KLHK
9	Nilai Implementasi SAKIP Itjen	LHE SAKIP Itjen	Nilai Implementasi SAKIP yang tertuang dalam LHE SAKIP
10	Tingkat APIP	Penilaian dari BPKP	Hasil penilaian dari BPKP terhadap Tingkat Kapabilitas APIP



Pengukuran capaian indikator kinerja kegiatan di masing-masing unit kerja tingkat eselon II di lingkup Inspektorat Jenderal dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 21. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Wilayah I Tahun 2019

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2019		
	Target	Realisasi	Capaian %
Sasaran Kegiatan : Pengawasan Internal yang Berkualitas			
Berkurangnya Jumlah Satker dengan Temuan Berulangnya	3 Satker	33 Satker	150
Sasaran Kegiatan : Mempertahankan Opini WTP			
Maksimum Temuan Kerugian Negara (APBN)	Rp3,1 M	Rp0,302 M	150
Sasaran Kegiatan : Peningkatan Nilai Implementasi SAKIP			
Tercapainya nilai akuntabilitas kinerja Eselon I	78 Point	79,54 Point	102

Indikator Kinerja Kegiatan atas Berkurangnya Jumlah Satker dengan Temuan Berulang terealisasi sebanyak 33 Satker atau 150% dari target 3 satker sekaligus mencapai target jangka menengah. Satker dimaksud terinci pada Lampiran 2.

Indikator Kinerja Kegiatan atas Temuan Kerugian Negara (APBN) Hasil Pemeriksaan BPK-RI berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor 14/LHP/XVII/05/2019 tanggal 17 Mei 2019 Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kementerian LHK Tahun 2018 sebesar Rp302.226.010,40 atau 150% dari target Rp3,1 M.

Indikator Kinerja Kegiatan atas Nilai Akuntabilitas Kinerja Eselon I tercapai 79,54 point atau 102% dari target 78 poin sekaligus mencapai target jangka menengah. Nilai tersebut merupakan rata-rata dari nilai implementasi SAKIP Eselon I yaitu nilai SAKIP Inspektorat Jenderal 83,04 point, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) 77,14 point, dan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) 78,44 point.

Tabel 22. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Wilayah I Tahun 2015- 2019

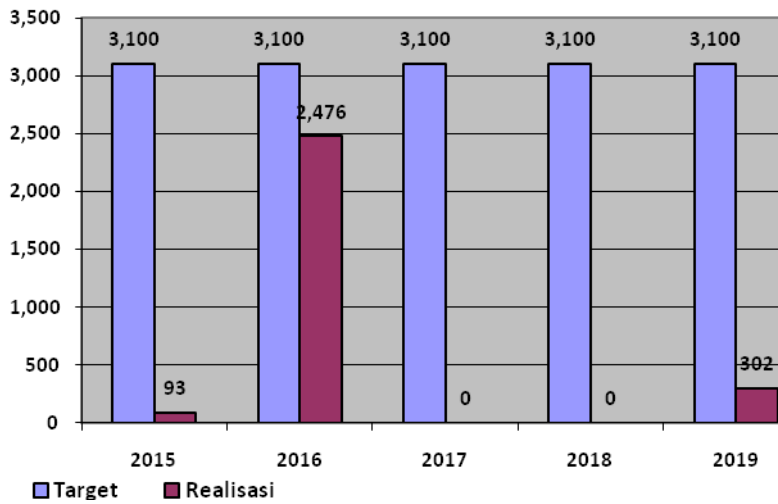
Kegiatan :
Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK Pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah I

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Sasaran Kegiatan : Pengawasan Internal yang Berkualitas										
Berkurangnya Jumlah Satker dengan Temuan Berulangannya	3	3	42	150	3	51	3	48	3	33
	Satker	Satker	Satker	%	Satker	Satker	Satker	Satker	Satker	Satker
Sasaran Kegiatan : Mempertahankan Opini WTP										
Maksimum Temuan Kerugian Negara (APBN) Pemeriksaan BPRK RI	Rp3,1 M	Rp0,9 3M	Rp2,476 M	120,13	Rp3,1 M	Rp0	Rp3,1 M	Rp0	Rp3,1 M	Rp0,302 M
	M	M	M	%	M		M		M	M
Sasaran Kegiatan : Peningkatan Nilai Implementasi SAKIP										
Tercapainya nilai akuntabilitas kinerja Eselon I	70	73,95	82,34	114,36	72	70,52	76	77,81	78	79,54
	point	point	point	point	point	point	point	point	Point	Point
	point	point	point		point	point	point	point	Point	Point
										102

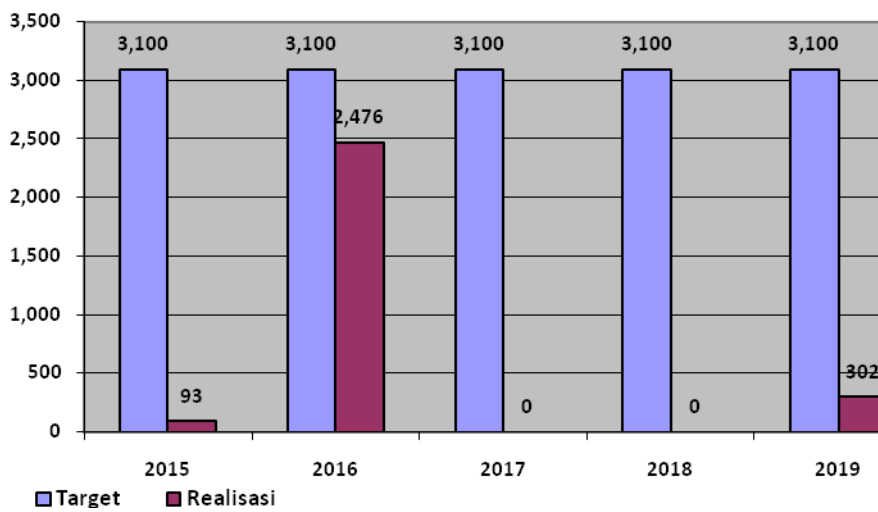
Pada table diatas dapat dilihat perkembangan capaian kinerja Inspektorat Wilayah I. Capaian kinerja pada berkurangnya jumlah satker dengan temuan berulang dibandingkan tahun lalu mengalami penurunan dari 48 satker di tahun 2018 menjadi 33 satker di tahun 2019. Hal ini dikarenakan jumlah satker yang diaudit di tahun 2019 tidak sebanyak tahun sebelumnya dan tahun 2019 lebih banyak pada kegiatan consulting.

Gambar 12. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Wilayah I Tahun 2015- 2019

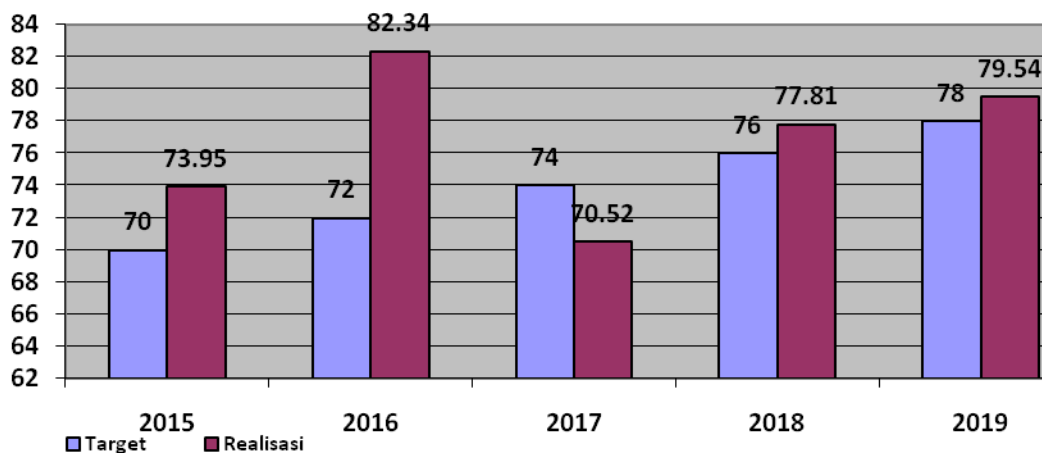
Maksimum Temuan Kerugian Negara (APBN) Hasil Pemeriksaan BPK RI



Maksimum Temuan Kerugian Negara (APBN) Hasil Pemeriksaan BPK RI



Tercapainya Nilai Akuntabilitas Kinerja Eselon I



Tabel 23. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Wilayah II Tahun 2019

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2019		
	Target	Realisasi	Capaian %
Sasaran Kegiatan : Pengawasan Internal yang Berkualitas			
Berkurangnya Jumlah Satker dengan Temuan Berulang	3 Satker	6 Satker	150
Sasaran Kegiatan : Mempertahankan Opini WTP			
Maksimum Temuan Kerugian Negara (APBN)	Rp3,1 M	Rp 0	150
Sasaran Kegiatan : Peningkatan Nilai Implementasi SAKIP			
Tercapainya nilai akuntabilitas kinerja Eselon I	78 Point	80,04 Point	103

Indikator Kinerja Kegiatan atas Berkurangnya Jumlah Satker dengan Temuan Berulang terealisasi sebanyak 6 Satker atau 150% dari target 3 satker. Satker dimaksud terinci pada Lampiran 2.

Indikator Kinerja Kegiatan atas Temuan Kerugian Negara (APBN) Hasil Pemeriksaan BPK-RI berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor 14/LHP/XVII/05/2019 tanggal 17 Mei 2019 Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kementerian LHK Tahun 2018 tidak ada temuan kerugian negara atau 150% dari target Rp3,1 M.

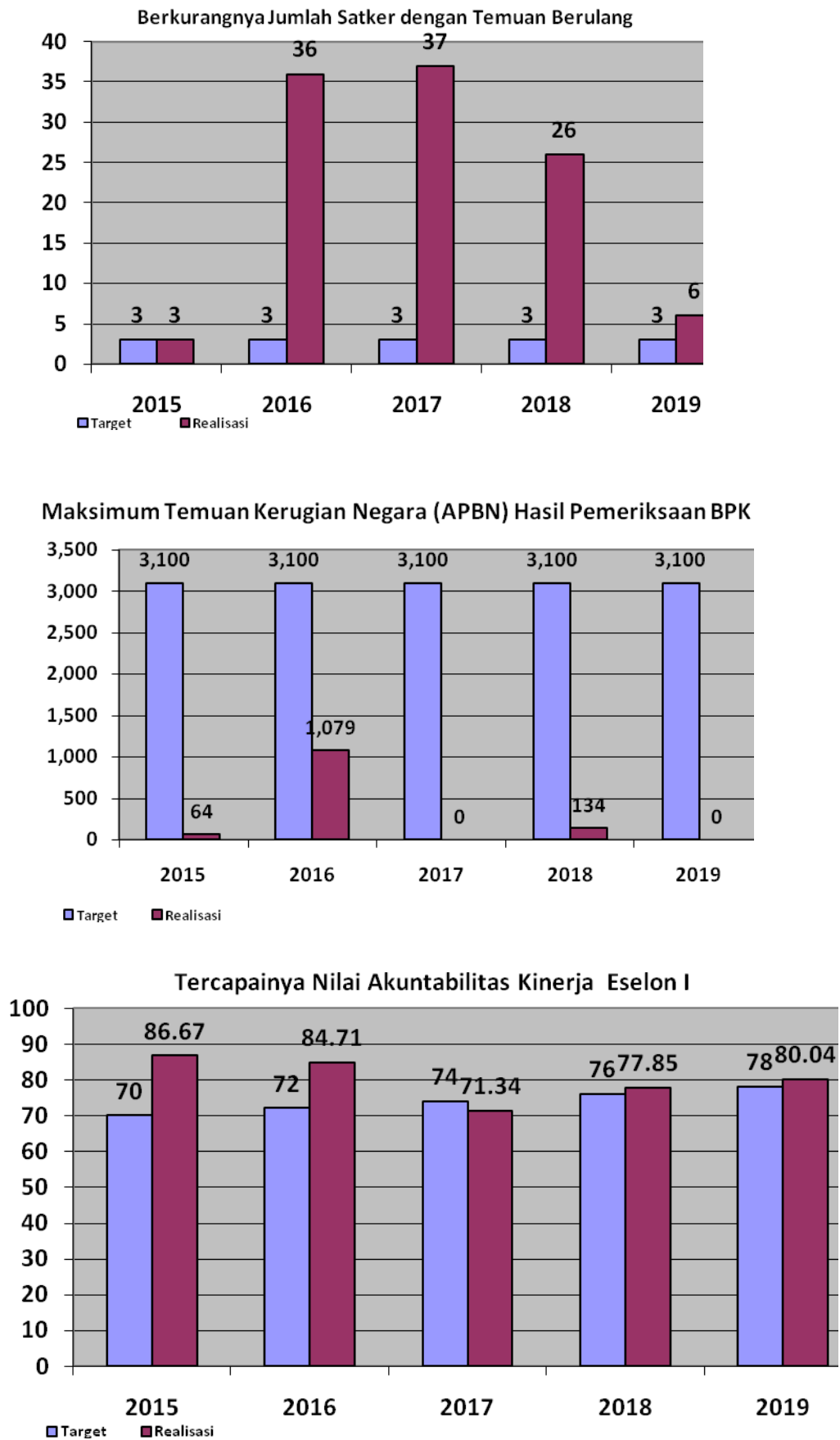
Indikator Kinerja Kegiatan atas Nilai Akuntabilitas Kinerja Eselon I tercapai 80,04 poin atau 103% dari target 78 poin. Nilai tersebut merupakan rata-rata dari nilai implementasi SAKIP Eselon I yaitu nilai SAKIP Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (PDASHL) 80,25 poin, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPPSDM) 82,99 poin, dan Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) 76,89 poin.

Tabel 24. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Wilayah II Tahun 2015- 2019

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019			
	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
Sasaran Kegiatan : Pengawasan Internal yang Berkualitas												
Berkurangnya Jumlah Satker dengan Temuan Berulangny	3	3	100	3	36	150	3	37	150	3	26	150
	Satker	Satker		Satker	Satker		Satker	Satker		Satker	Satker	Satker
Sasaran Kegiatan : Mempertahankan Opini WTP												
Maksimum Temuan Kerugian Negara (APBN) Hasil Pemeriksaan BPRK RI	Rp3,1 M	Rp0,64 M	150	Rp3,1 M	1,079M	150	Rp3,1 M	Rp.0,13 4 M	150	Rp3,1 M	Rp0,13 4 M	150
Sasaran Kegiatan : Peningkatan Nilai Implementasi SAKIP												
Tercapainya nilai akuntabilitas kinerja Eselon I	70	86,67	123,81	72	84,71	117,65	74	71,34	96,40	76	77,85	102,43
	point	point		point	point		point	point		point	point	point
												78
												Point
												Point
												103%

Pada table diatas dapat dilihat perkembangan capaian kinerja Inspektorat Wilayah II. Pada indikator berkurangnya jumlah satker dengan temuan berulang mengalami peningkatan sebanyak 3 Satker dari tahun 2018. Inspektorat Wilayah II di tahun 2019 melaksanakan kegiatan consulting dan audit kinerja. Jumlah satker yang dilakukan audit pada tahun 2019 sebanyak 35 Satker.

Gambar 13. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Wilayah II Tahun 2015- 2019





Tabel 25. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Wilayah III Tahun 2019

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2019		
	Target	Realisasi	Capaian %
Sasaran Kegiatan : Pengawasan Internal yang Berkualitas			
Berkurangnya Jumlah Satker dengan Temuan Berulangnya	3 Satker	5 Satker	150
Sasaran Kegiatan : Mempertahankan Opini WTP			
Maksimum Temuan Kerugian Negara (APBN)	Rp3,1 M	Rp 0	150
Sasaran Kegiatan : Peningkatan Nilai Implementasi SAKIP			
Tercapainya nilai akuntabilitas kinerja Eselon I	78 Point	77,64 Point	99,5

Indikator Kinerja Kegiatan atas Berkurangnya Jumlah Satker dengan Temuan Berulang terealisasi sebanyak 5 Satker atau 150% dari target 3 satker. Satker dimaksud terinci pada Lampiran 2.

Indikator Kinerja Kegiatan atas Temuan Kerugian Negara (APBN) Hasil Pemeriksaan BPK-RI berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor 14/LHP/XVII/05/2019 tanggal 17 Mei 2019 Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kementerian LHK Tahun 2018 tidak ada temuan kerugian negara atau 150% dari target Rp3,1 M.

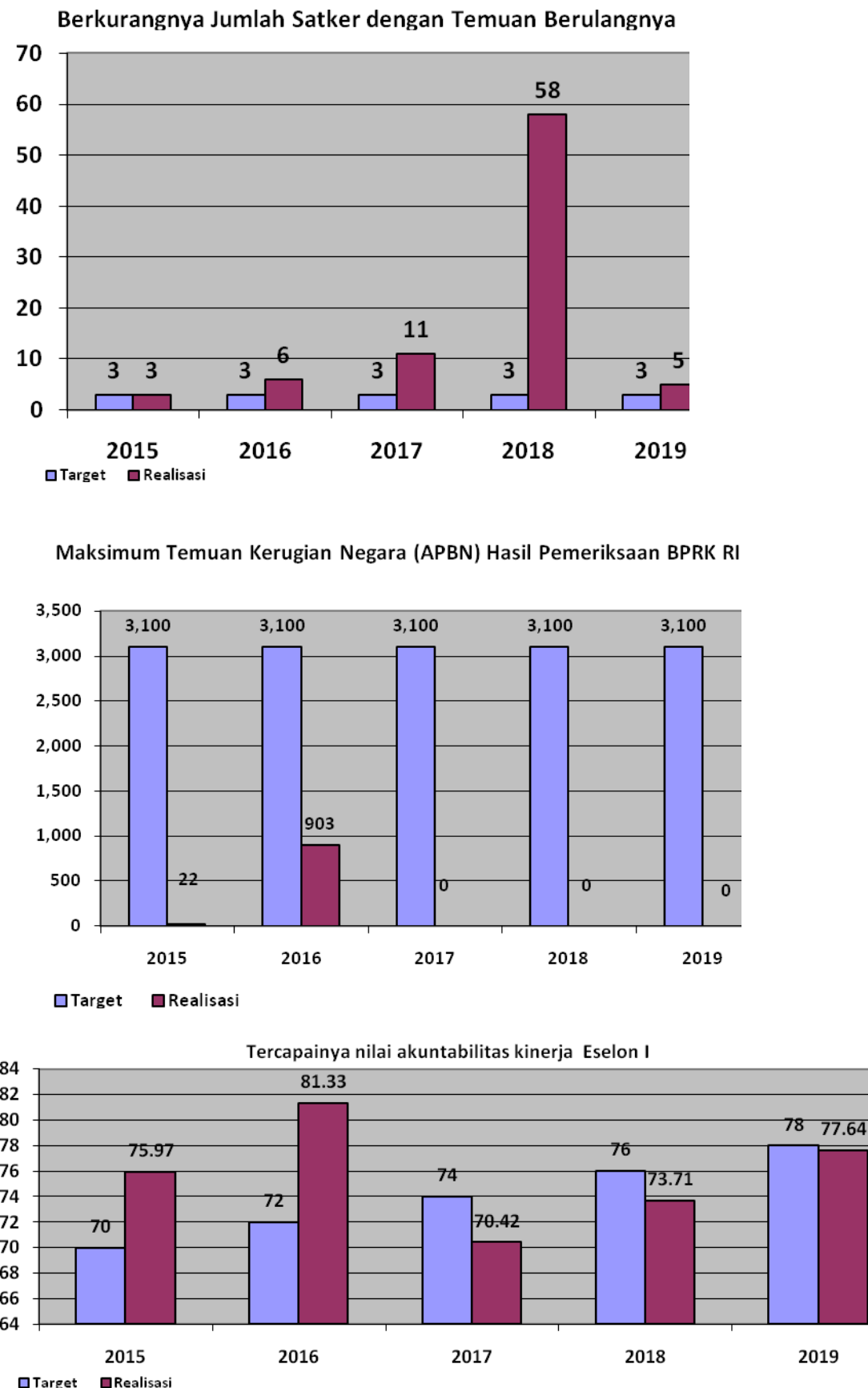
Indikator Kinerja Kegiatan atas Nilai Akuntabilitas Kinerja Eselon I tercapai 77,64 point atau 99,5% dari target 78 point. Nilai tersebut merupakan rata-rata dari nilai implementasi SAKIP Eselon I yaitu nilai SAKIP Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi 76,15 point, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan 76,64 point, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari 77,70 point dan Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya 76,15 poin.

Tabel 26. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Wilayah III Tahun 2015- 2019

Kegiatan : Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK Pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah III										
Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019	
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Target	Realisasi
		%		%		%		%		%
Sasaran Kegiatan : Pengawasan Internal yang Berkualitas										
Berkurangnya Jumlah Satker dengan Temuan Berulangannya	3 Satker	3 Satker	100 %	3 Satker	6 satker	150 %	3 Satker	11 Satker	5 Satker	150 %
Sasaran Kegiatan : Mempertahankan Opini WTP										
Maksimum Temuan Kerugian Negara (APBN) Hasil Pemeriksaan BPRK RI	Rp3,1 M	Rp0,22 M	150 %	Rp3,1 M	Rp0,903 M	150 %	Rp3,1 M	Rp0 M	Rp3,1 M	150 %
Sasaran Kegiatan : Peningkatan Nilai Implementasi SAKIP										
Tercapainya nilai akuntabilitas kinerja Eselon I	70 point	75,97 point	108,53 %	72 point	81,33 point	112,96 %	74 point	70,42 point	76 point	96,98 %
									78 Point	77,64 Point
										99,5 Point

Dari table diatas dapat dilihat perkembangan capaian kinerja pada Inspektorat Wilayah III. Inspektorat Wilayah III di tahun 2019 melaksanakan audit kinerja pada 38 Satker dan kegiatan *consulting*. Di tahun 2019 realisasi kinerja berkuranganya jumlah satker dengan temuan berulang sebanyak 5 satker, jika dibandingkan dengan target jangka menengah, realisasi kinerja tersebut mencapai target jangka menengah.

Gambar 14. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Wilayah III Tahun 2015- 2019



Tabel 27. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Wilayah IV Tahun 2019

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2019		
	Target	Realisasi	Capaian %
Sasaran Kegiatan : Pengawasan Internal yang Berkualitas			
Berkurangnya Jumlah Satker dengan Temuan Berulangannya	3 Satker	19 Satker	150
Sasaran Kegiatan : Mempertahankan Opini WTP			
Maksimum Temuan Kerugian Negara (APBN)	Rp3,1 M	Rp 0	150
Sasaran Kegiatan : Peningkatan Nilai Implementasi SAKIP			
Tercapainya nilai akuntabilitas kinerja Eselon I	78 Point	77,56 Point	99,43

Indikator Kinerja Kegiatan atas Berkurangnya Jumlah Satker dengan Temuan Berulang terealisasi sebanyak 19 Satker atau 150% dari target 3 satker. Satker dimaksud terinci pada Lampiran 2.

Indikator Kinerja Kegiatan atas Temuan Kerugian Negara (APBN) Hasil Pemeriksaan BPK-RI berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor 14/LHP/XVII/05/2019 tanggal 17 Mei 2019 Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kementerian LHK Tahun 2018 tidak ada temuan kerugian negara atau 150% dari target Rp3,1 M.

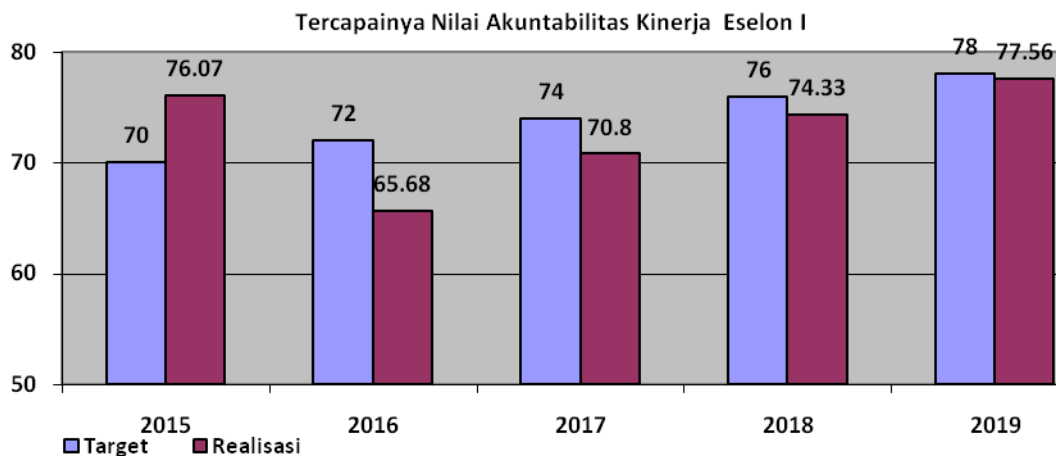
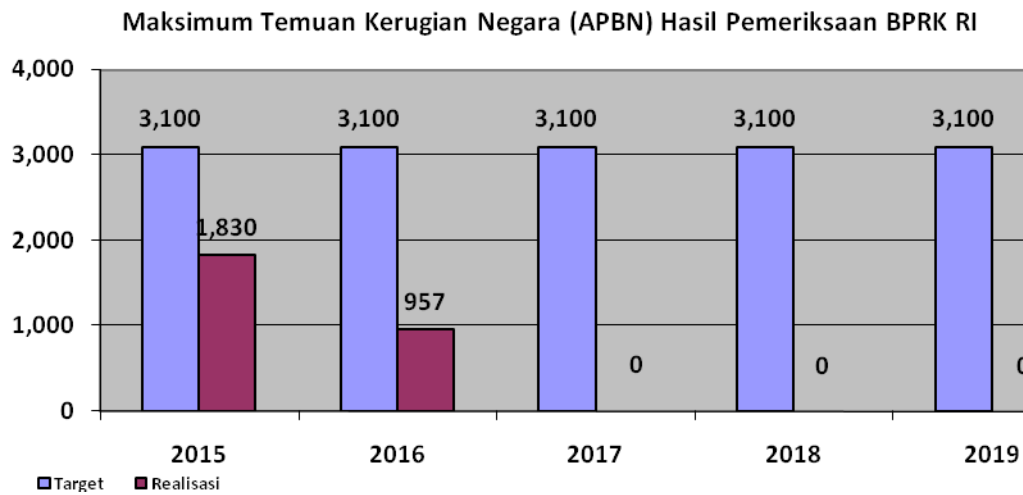
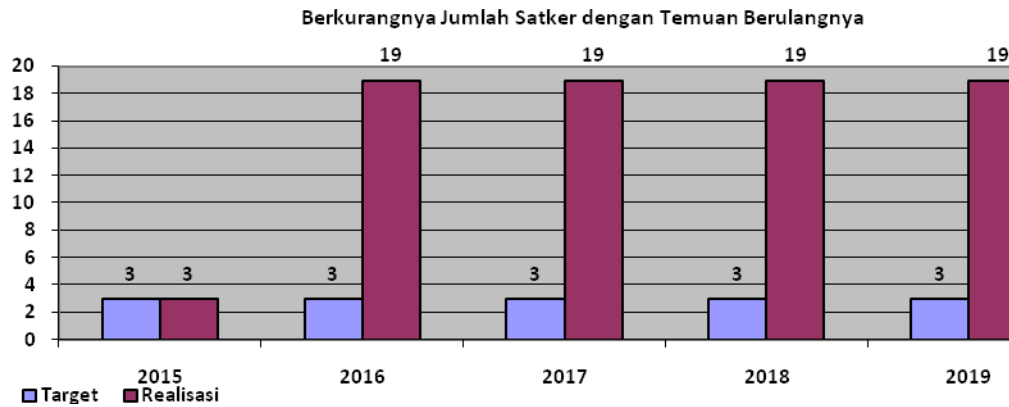
Indikator Kinerja Kegiatan atas Nilai Akuntabilitas Kinerja Eselon I tercapai 77,56 point atau 99,43% dari target 78 poin. Nilai tersebut merupakan rata-rata dari nilai implementasi SAKIP Eselon I yaitu nilai SAKIP Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim 77,01 point, Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 78,49 point, dan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan 77,17 point.

Tabel 28. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Wilayah IV Tahun 2015- 2019

Kegiatan : Pengewasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK Pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah IV															
Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019		
	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
Sasaran Kegiatan : Pengawasan Internal yang Berkualitas															
Berkurangnya Jumlah Satker dengan Temuan Berulangny	3 Satker	3 Satker	100	3 Satker	19 Satker	150	3 Satker	19 Satker	150	3 Satker	19 Satker	150	3 Satker	19 Satker	150
Sasaran Kegiatan : Mempertahankan Opini WTP															
Maksimum Temuan Kerugian Negara (APBN) Hasil Pemeriksaan BPRK RI	Rp3,1 M	Rp1,83 M	141,09	Rp3,1 M	0,957 M	150	Rp3,1 M	Rp.0	150	Rp 3,1M	Rp0	150	Rp 3,1 M	Rp0	150
Sasaran Kegiatan : Peningkatan Nilai Implementasi SAKIP															
Tercapainya nilai akuntabilitas kinerja Eselon I	70 point	67,07 point	95,81	72 Point	65,68 point	91,22	74 point	70,80 point	95,68	76 point	74,33 point	97,81	78 Point	77,56 Point	99,43

Pada indikator Berkurangnya Jumlah Satker dengan Temuan Berulang tidak ada perubahan jumlah satker dibandingkan tahun lalu. Jumlah Satker yang di audit di tahun 2018 dan 2019 sebanyak 38 satker dan 32 satker. Inspektorat Wilayah IV di tahun 2019 melaksanakan kegiatan consulting dan audit kinerja.

Gambar 15. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Wilayah IV Tahun 2015- 2019





Tabel 29. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Investigasi Tahun 2019

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2019		
	Target	Realisasi	Capaian %
Sasaran Kegiatan : Pengawasan Kasus yang Berindikasi KKN			
Jumlah kasus yang diselesaikan melalui pengawasan investigatif	20 Kasus	27 Kasus	130
Sasaran Kegiatan : Penanganan Pengaduan Masyarakat (Dumas)			
Jumlah pengaduan masyarakat (Dumas) yang diselesaikan	20 Dumas	20 Dumas	100
Sasaran Kegiatan : Penanganan Pengaduan Masyarakat (Dumas)			
Jumlah rekomendasi unit kerja yang berpredikat WBK (3 Satker/tahun)	5 Rekomendasi	6 Rekomendasi	120

Indikator Kinerja Kegiatan atas Jumlah Kasus yang Diselesaikan Melalui Pengawasan Investigatif terealisasi sebanyak 27 kasus atau 130% dari target 20 kasus. Yang terdiri dari 12 audit investigatif dan 15 identifikasi khusus.

Indikator Kinerja Kegiatan atas Jumlah Pengaduan Masyarakat (Dumas) yang Diselesaikan terealisasi sebanyak 20 dumas atau 100% dari target 20 dumas.

Indikator Kinerja Kegiatan atas Jumlah Rekomendasi Unit Kerja yang WBK terealisasi sebanyak 6 rekomendasi atau 120% dari target 5 rekomendasi. Satker dimaksud terdiri dari Sekretariat Inspektorat Jenderal, Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM, BPKH Wilayah XI Yogyakarta, BPPLHK Pekanbaru, BPPLHK Samarinda dan BTN Alas Purwo.

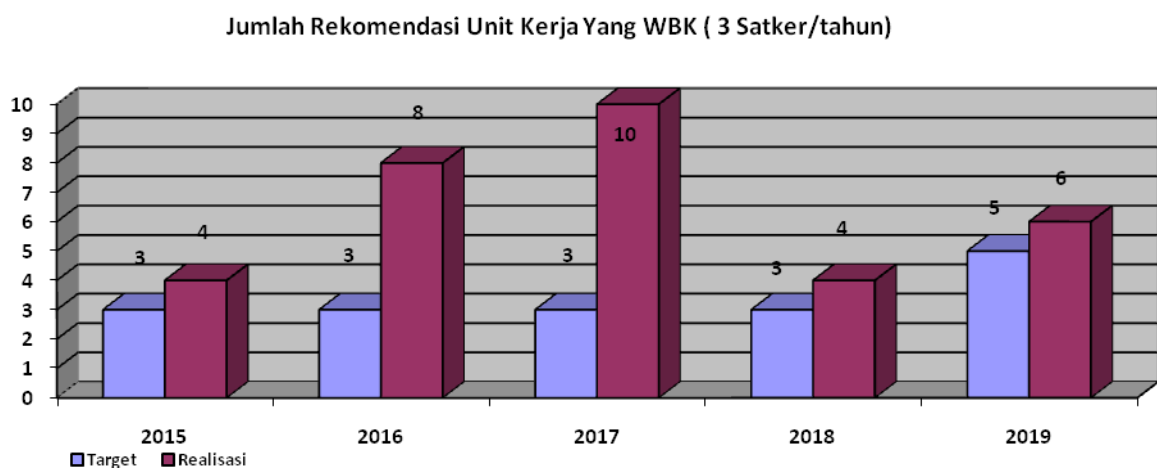
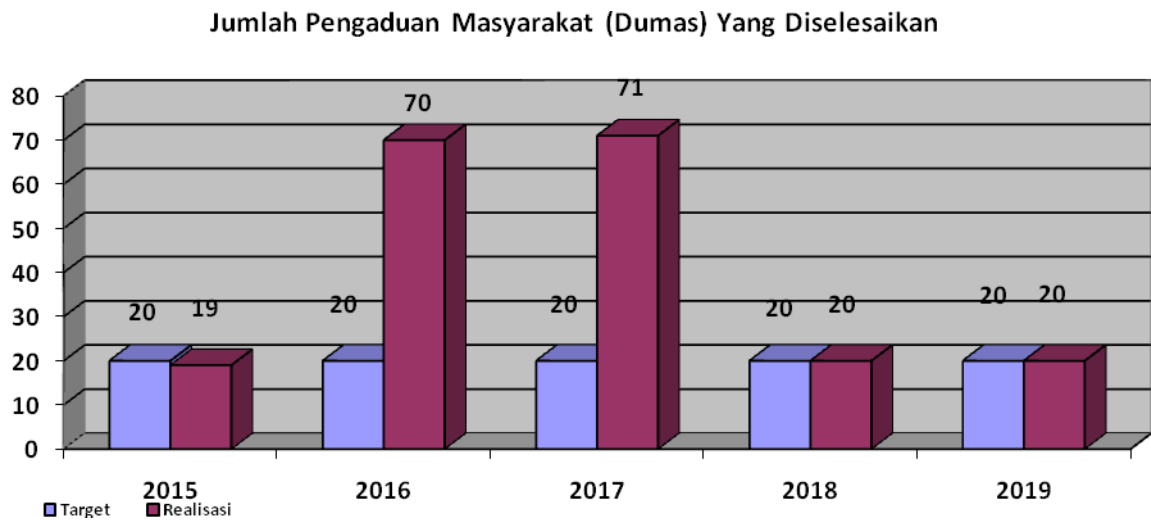
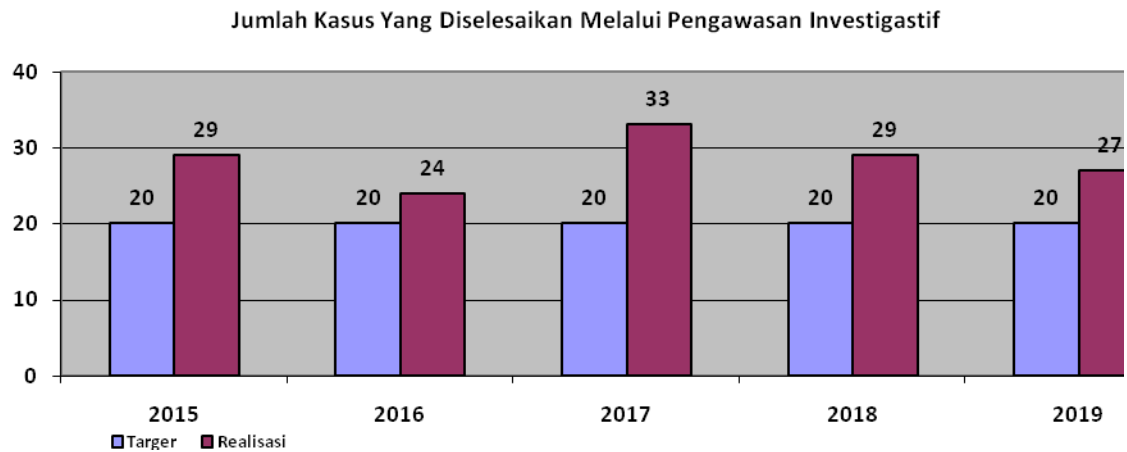
Tabel 30. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Investigasi Tahun 2015- 2019

Kegiatan : Pengawasan Terhadap Kasus Pelanggaran yang Berindikasi KKN Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
		Capaian %		Capaian %		Capaian %		Capaian %		Capaian %
Sasaran Kegiatan : Pengawasan Kasus yang Berindikasi KKN										
Jumlah kasus yang diselesaikan melalui pengawasan investigatif	20 Kasus	29 Kasus	20 kasus	24 Kasus	20 kasus	33 kasus	20 Kasus	29 Kasus	20 Kasus	27 Kasus
		145%		120 %		150 %		145 %		130 %
Sasaran Kegiatan : Penanganan Pengaduan Masyarakat (Dumas)										
Jumlah pengaduan masyarakat (Dumas) yang diselesaikan	20 Dumas	19 Dumas	20 Dumas	70 Dumas	20 dumas	71 dumas	20 Dumas	20 Dumas	20 Dumas	20 Dumas
		95%		150 %		150 %		100 %		100 %
Sasaran Kegiatan : Pengembangan unit kerja menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)										
Jumlah rekomendasi unit kerja yang WBK (3 Satker/tahun)	3 rekomendasi ndasi	4 rekomendasi dasi	3 rekom endasi	8 rekomen dasi	3 rekom endasi	10 Rekom ndasi	3 Rekom ndasi	4 Rekome ndasi	5 Rekom endasi	6 Rekomendasi
		133,33 %		150 %		150 %		133,33 %		120 %

Indikator Jumlah kasus yang diselesaikan melalui pengawasan investigatif mengalami penurunan dari tahun 2018 dikarenakan penanganan dumas ada sebagian yang dilimpahkan kepada eselon I, sedangkan kegiatan pengawasan investigatif merupakan tindak lanjut dari dumas yang menjadi kewenangan Inspektorat Jenderal.

Indikator Satker Wilayah Bebas dari Korupsi mengalami peningkatan dari tahun 2018 yang semula 4 Satker menjadi 6 Satker di tahun 2019, dikarenakan Satker yang diusulkan merupakan Satker yang sudah dilakukan evaluasi pada tahun 2018, sehingga Satker tersebut telah siap untuk diusulkan kembali di tahun 2019.

Gambar 16. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Investigasi Tahun 2015- 2019



Tabel 31. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2019

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2019		
	Target	Realisasi	Capaian %
Sasaran Kegiatan : Penyelesaian tindak lanjut hasil audit internal			
Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut yang tuntas hasil audit internal	4.000 Saran	4.017 Saran	100,43
Sasaran Kegiatan : Terselenggaranya sistem pengendalian intern di satker lingkup Kementerian LHK			
Tingkat kematangan implementasi SPIP	Level 3	Level 3	100
Sasaran Kegiatan : Mendukung kegiatan tugas teknis Itjen			
Nilai implementasi SAKIP Itjen	106	78 Point	83,04
Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100

Indikator Kinerja Kegiatan atas Meningkatkan Penyelesaian Tindak Lanjut yang Tuntas Hasil Audit Internal terealisasi sebanyak 4.017 saran atau 100,43% dari target 4.000 saran.

Indikator Kinerja Kegiatan atas Tingkat Kematangan Implementasi SPIP 2019 berada pada level 3 atau 100% dari target level 3 berdasarkan paparan Direktur Pengawasan Bidang Pangan, Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Alam BPKP.


Indikator Kinerja Kegiatan atas Nilai Implementasi SAKIP Inspektorat Jenderal Kementerian LHK mendapat nilai 83,04 point atau 106% dari target 78 point.

Indikator Kinerja Kegiatan atas Tingkat Kapabilitas APIP tahun 2019 berada pada level 3 atau 100% dari target level 3.

Tabel 32. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2015- 2019

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019	
	Target Realisasi	Capaian %	Target Realisasi	Capaian %	Target Realisasi	Capaian %	Target Realisasi	Capaian %	Target Realisasi	Capaian %
Sasaran Kegiatan : Penyelesaian tindak lanjut hasil audit internal										
Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut yang tuntas hasil audit internal	2.500 saran	112,60	2.000 saran	121,80	2.500 saran	103,96	2.000 saran	102,75	4.000 Saran	100,43
Sasaran Kegiatan : Terselenggaranya sistem pengendalian intern di satek lingkup Kementerian LHK										
Tingkat kematangan implementasi SPIP	Level 1	Level 1	Level 1	Level 2	Level 1	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3
Sasaran Kegiatan : Mendukung kegiatan tugas teknis Itjen										
Nilai implementasi SAKIP Itjen	70 point	82,30 point	72 point	83,22 Point	74 Point	72,29 Point	76 point	80,92 Point	78 Point	83,04
Tingkat Kapabilitas APIP	Level 1	Level 2 dengan perbaikan	Level 1	Level 2	Level 2	Level 3 dengan catatan	Level 2	Level 3 Penuh	Level 3	Level 3

Pada tabel diatas dapat dilihat capaian kinerja dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 pada masing-masing indikator. Untuk indikator Meningkatkan penyelesaian tindak lanjut yang tuntas hasil audit internal dilihat dari capaian kinerja di tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018 menurun sebanyak 2,34%, namun jika membandingkan target output meningkat 100%.

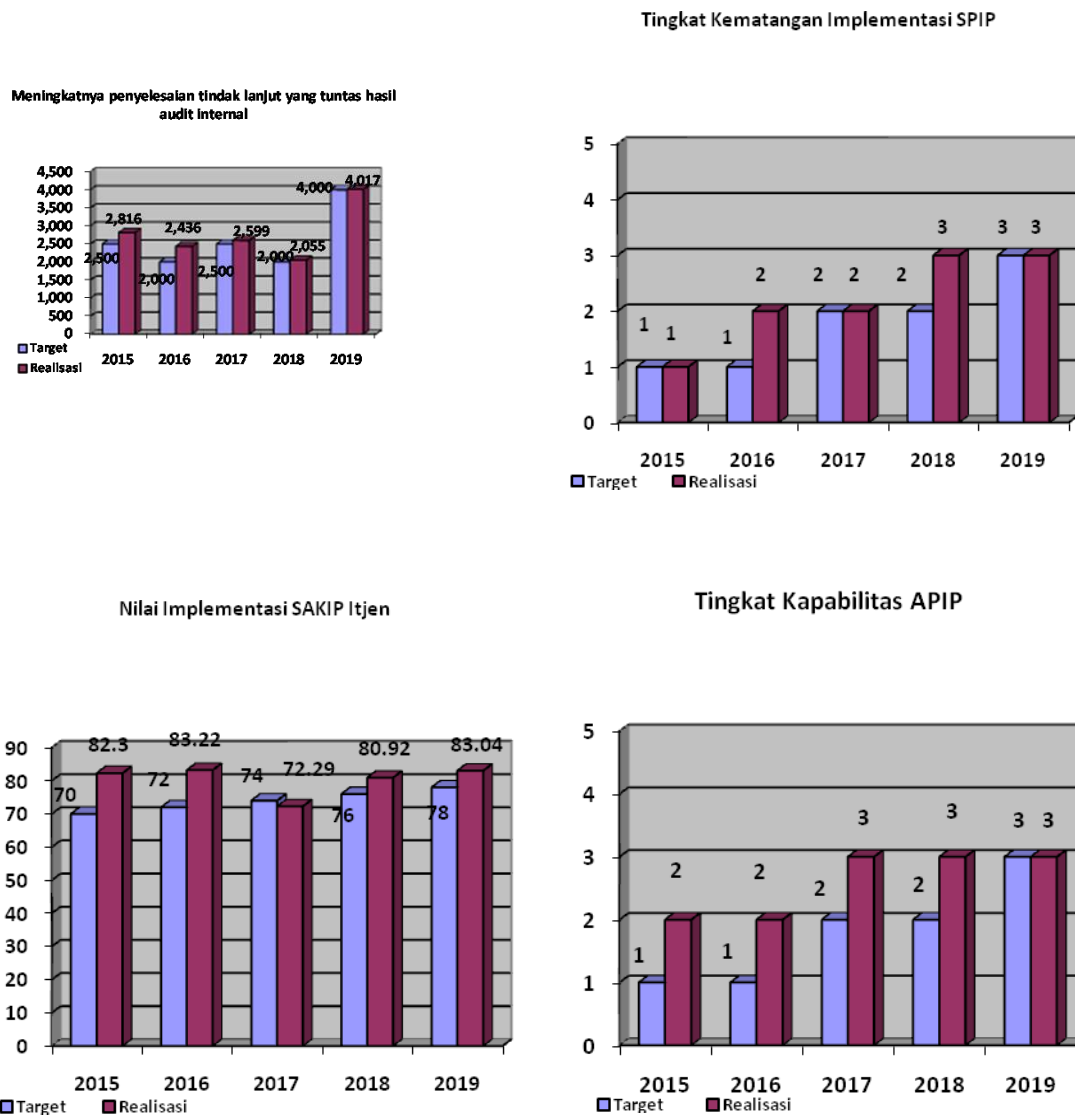


Walau demikian untuk capaian kedua tahun tersebut telah mencapai target yang ditetapkan. Realisasi tersebut juga mencapai target jangka menengah yang telah ditetapkan.

Capaian maturitas SPIP tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 0,0977 poin di bandingkan dengan nilai maturitas SPIP tahun 2018. Peningkatan capaian kinerja tersebut di sebabkan adanya beberapa kegiatan yang mendorong peningkatan implelementasi SPIP, antara lain pemantaun penyelenggaraan SPIP pada Satker lingkup Kementerian LHK, Workshop SPIP dan penilaian mandiri maturitas SPIP.

Capaian implementasi SAKIP Itjen tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 2,12 poin dibandingkan dengan nilai tahun 2018. Peningkatan capaian kinerja tersebut di beberapa komponen penilaian yaitu komponen perencanaan kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

Gambar 17. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2015- 2019



Dengan demikian capaian kinerja kegiatan Inspektorat Jenderal secara keseluruhan bisa dinyatakan berhasil mencapai target yang ditetapkan. Adapun faktor keberhasilan tersebut adalah terlaksananya pembinaan terhadap auditi, pendampingan atas penyusunan laporan keuangan dan pendampingan pemeriksaan BPK RI, dan sosialisasi peraturan untuk meningkatkan nilai dan kualitas SAKIP Kementerian LHK.

Selain itu Inspektorat Jenderal akan terus melakukan koordinasi yang intensif dengan auditi dalam penyelesaian rekomendasi temuan hasil audit internal. Hal ini sebagai upaya untuk terus meningkatkan peran Inspektorat Jenderal sebagai pengawas internal.

B. Realisasi Anggaran

Berdasarkan DIPA nomor DIPA-029.02.1.426860/2019 tanggal 5 Desember 2018 sebesar, Inspektorat Jenderal pada tahun 2019 mendapatkan anggaran sebesar Rp86.837.312.000,00

Realisasi anggaran tahun 2019 sebesar Rp85.617.728.663,00 atau sebesar 98,60% dari total anggaran. Jika dibandingkan dengan persentase realisasi anggaran Kementerian LHK dan APBN Nasional, nilai realisasi anggaran tersebut lebih besar dari persentase realisasi anggaran Kementerian LHK sebesar 95,41% dan persentase realisasi APBN Nasional (90,33%).

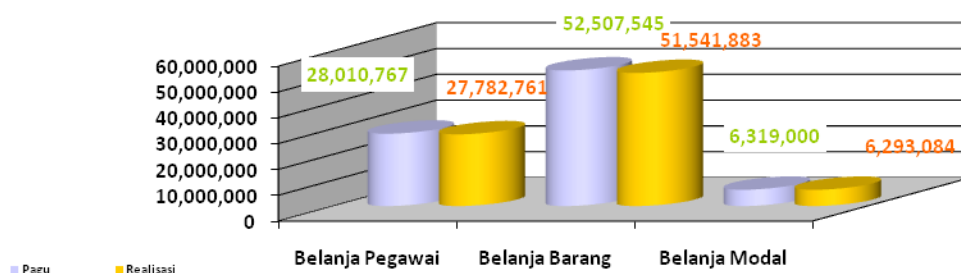
Tabel 33. Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2019

PROGRAM/ KEGIATAN POKOK	PAGU Rp (x1.000)	Realisasi	
		Rp (x1.000)	%
Inspektorat Jenderal	86,837,312	85,617,728.66	98.60%
Inspektorat Wilayah I	5,213,440	5,180,991.17	99.38%
Inspektorat Wilayah II	5,279,228	5,216,119.76	98.80%
Inspektorat Wilayah III	6,104,075	6,010,382.80	98.47%
Inspektorat Wilayah IV	5,602,160	5,568,406.07	99.40%
Inspektorat Investigasi	5,410,920	5,322,680.66	98.37%
Sekretariat Inspektorat Jenderal	59,227,489	58,319,148.20	98.47%

Realisasi anggaran pada tahun 2019 berdasarkan jenis belanja disajikan pada Tabel berikut ini :

Tabel 34. Realisasi anggaran tahun 2019 berdasarkan Jenis Belanja

JENIS BELANJA	PAGU (x Rp.1.000)	REALISASI (xRp.1.000)	%
Belanja Pegawai	28,010,767	27,782,761.19	99.19%
Belanja Barang	52,507,545	51,541,883.66	98.16%
a. Operasional	5,451,002	5,274,514.71	96.76%
b. Non Operasional	47,056,543	46,267,368.95	98.32%
Belanja Modal	6,319,000	6,293,084.81	99.59%
JUMLAH	86,837,312	85,617,729.66	98.60 %



Gambar 18. Realisasi anggaran per jenis belanja Tahun 2019

Tabel 35. Perbandingan Realisasi anggaran Tahun 2018 dengan tahun 2019 Berdasarkan Jenis Belanja

JENIS BELANJA	Tahun 2018		Tahun 2019		%
	PAGU (x Rp.1.000)	REALISASI (xRp.1.000)	PAGU (x Rp.1.000)	REALISASI (xRp.1.000)	
Belanja Pegawai	29,265,635	28,722,546.73	28,010,767	27,782,761.19	99.19%
Belanja Barang	34,761,091	33,637,575.85	52,507,545	51,541,883.66	98.16%
a. Operasional	3,445,963	3,426,909.04	5,451,002	5,274,514.71	96.76%
b. Non Operasional	31,315,128	30,210,666.81	47,056,543	46,267,368.95	98.32%
Belanja Modal	943,799	914,802.40	6,319,000	6,293,084.81	99.59%
JUMLAH	64,970,525	63,274,924.98	86,837,312	85,617,729.66	98.60 %

Dari realisasi tersebut dapat dilakukan pengukuran nilai efisiensi pencapaian kinerja 2019 dengan membandingkan realisasi anggaran tahun 2019 terhadap pencapaian kinerja tahun 2019. Dalam hal ini penggunaan anggaran sebesar Rp85.617.728.663 atau sebesar 98,60% dengan capaian kinerja Inspektorat Jenderal sebesar 100%. Berdasarkan angka tersebut dilakukan perhitungan didapat nilai efisiensi sebesar 0,99. Angka ini menunjukkan bahwa pengalokasian anggaran telah digunakan secara efisien untuk mencapai kinerja fisik *output* dan *outcome* yang telah ditentukan.

Pengukuran tingkat efisiensi secara rinci, ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 35. Capaian Tingkat Efisiensi Pelaksanaan Kinerja

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Capaian Pelaksanaan Anggaran	Rasio (2/3)	Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tingkat kapabilitas APIP Kementerian LHK	100	98.60	0,99	E F I S I E N
Kematangan Implementasi SPIP	100			
Nilai Implementasi SAKIP Kementerian LHK	100			
Rerata	100			

BAB IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Pada tahun 2019 capaian kinerja indikator kinerja program, antara lain :
 - a. Tingkat Kapabilitas APIP berada pada level 3 penuh atau mencapai 100,00% dari target. Hasil validasi BPKP berdasarkan laporan nomor LQAPIP-225/D102/2/2019 tanggal 31 Desember 2019.
 - b. Tingkat Kematangan Implementasi SPIP berada pada level 3 atau mencapai 100,00% dari target. Berdasarkan Laporan Hasil Penjaminan Kualitas Atas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Tahun 2019 pada Kementerian LHK nomor LHV-224/D102/2/2019 tanggal 31 Desember 2019 didapat hasil penilaian sebesar 3,134 dengan demikian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian LHK tahun 2019 berada pada level 3 dengan kategori “terdefinisi” atau 100% tercapai dari target.
 - c. Berdasarkan evaluasi SAKIP pada masing-masing Eselon I lingkup Kementerian LHK yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal diperoleh nilai SAKIP Kementerian LHK sebesar 77,32 poin yang termasuk kategori BB (sangat baik), namun demikian penetapan nilai akhir SAKIP masih menunggu hasil evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
2. Nilai efisiensi pencapaian kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2019 adalah 0,99 yang berarti bahwa pengalokasian anggaran telah digunakan secara efisien untuk mencapai kinerja sesuai dengan yang telah ditetapkan.

B. Langkah-langkah di Masa Mendatang

Langkah-langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

1. Peningkatan Kapabilitas SDM/APIP secara intensif dan berkelanjutan;
2. Penambahan SDM auditor/APIP dalam rangka mendukung pelaksanaan kinerja APIP;
3. Peningkatan Sarana dan Prasarana penunjang kegiatan pengawasan lingkup Inspektorat Jenderal;
4. Penyempurnaan dan penyusunan regulasi di bidang pengawasan internal lingkup Kementerian LHK;
5. Meningkatkan peran *consulting* dalam mengawal kegiatan prioritas nasional;
6. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan SPIP lingkup Kementerian LHK;
7. Peningkatan anggaran Inspektorat Jenderal sesuai dengan beban tugas Inspektorat Jenderal yang semakin berkembang seperti membangun sistem WBS yang berkerjasama dengan KPK, mengawal proyek prioritas nasional lingkup Kementerian LHK.
8. Menyusun rencana tindak lanjut peningkatan kapabilitas APIP menuju level 4 sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku.
9. Meningkatkan praktek-praktek yang baik sebagaimana kapabilitas pada level 3 dengan mengimplementasikan *key proses area* (KPA) secara baik dan terus menerus
10. Melakukan self assesement secara berkala, untuk menjaga dan memelihara kapabilitas APIP level 3
11. Menindaklanjuti hasil QA atas penilaian mandiri pada Itjen KLHK
12. Menyusun rencana aksi mendetail untuk setiap kegiatan.



LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dr. Ir. ILYAS ASAAD, MP., MH

Jabatan : INSPEKTUR JENDERAL

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc

Jabatan : MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dalam upaya tersebut akan melaksanakan pengawasan melekat berjenjang, internalisasi revolusi mental serta mendorong dan membangun generasi berwawasan lingkungan. Pencapaian target kinerja tersebut merupakan bagian tak terpisahkan atas tanggung jawab jabatan.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2018

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc


Dr. Ir. ILYAS ASAAD, MP., MH
NIP. 19590519 198511 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
INSPEKTORAT JENDERAL**

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
a.	Pengawasan Yang Berkualitas dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang LHK.	Tingkat Kapabilitas APiP Kementerian LHK Tingkat Kematangan Implementasi SPIP Nilai SAKIP Kementerian	Level 3 Level 3 BB

**Anggaran(x Rp.1.000,-)
86.837.312**

**No. Program / Kegiatan
Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang
Lingkungan Hidup Dan Kehutanan**

1. Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Itwil I.
2. Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Itwil II.
3. Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Itwil III.
4. Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Itwil IV.
5. Pengawasan Terhadap Kasus Pelanggaran yang Berindikasi KKN.
6. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal Kementerian LHK.

Jakarta, Desember 2018

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

INSPEKTUR JENDERAL

Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc

Dr. Ir. ILYAS ASAAD, MP., MH
NIP. 19590519 198511 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Murdiyono

Jabatan : Sekretaris Inspektorat Jenderal

selanjutnya disebut dengan pihak pertama.

Nama : Dr. Ir. Ilyas Asaad, MP., MH

Jabatan : Inspektur Jenderal

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2019

Pihak Kedua,

Dr. Ir. Ilyas Asaad, MP., MH
NIP. 19590519 198511 1 001

Pihak Pertama,

Dr. Murdiyono
NIP. 19610331 198603 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penyelesaian tindak lanjut hasil audit internal.	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut yang tuntas hasil audit internal.	4.000 saran
2	Terselenggaranya sistem pengendalian intern di satker lingkup KLHK	Tingkat kematangan implementasi SPIP	level 3
3	Mendukung kegiatan tugas teknis Itjen	Nilai implementasi SAKIP Itjen	78 point
		Tingkat kapabilitas APIP	level 3

Kegiatan/Output :

Anggaran

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <p>1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kementerian Kehutanan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Rekomendasi hasil audit internal yang ditindaklanjuti secara tuntas. b. Tingkat kematangan implementasi SPIP. c. Tingkat implementasi SAKIP Itjen. d. Tingkat kapabilitas APIP. e. Layanan dukungan Manajemen Eselon I. f. Layanan internal (overhead). g. Layanan perkantoran. | <p>Rp 59.227.489.000,00</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|

Inspektur Jenderal,

Jakarta, 2019
Sekretaris Inspektorat Jenderal,



Dr. Ir. Ilyas Asaad, MP., MH
NIP. 19590519 198511 1 001



Dr. Murdiyono
NIP. 19610331 198603 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 1 Tahun	Target Per Triwulan			
				I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Penyelesaian tindak lanjut hasil audit internal.	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut yang tuntas hasil audit internal.	4.000 saran	1.000	1.750	2.500	4.000
2	Terselenggaranya sistem pengendalian intern di satker lingkup KLHK .	Tingkat kematangan implementasi SPIP	level 3	-	-	-	level 3
3	Mendukung kegiatan tugas teknis Itjen.	Nilai implementasi SAKIP Itjen	78 point	-	78 point	78 point	78 point
		Tingkat kapabilitas APIP	level 3	-	-	-	level 3

Kegiatan/Output :

Anggaran

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kementerian Kehutanan. Rp 59.227.489.000,00
- a. Rekomendasi hasil audit internal yang ditindaklanjuti secara tuntas.
 - b. Tingkat kematangan implementasi SPIP.
 - c. Tingkat implementasi SAKIP Itjen.
 - d. Tingkat kapabilitas APIP.
 - e. Layanan dukungan Manajemen Eselon I.
 - f. Layanan Sarana dan Prasarana Internal.
 - g. Layanan perkantoran.

Inspektur Jenderal,



Dr. Ir. Ilyas Asaad, MP., MH
 NIP. 19590519 198511 1 001

Jakarta, 2019

Sekretaris Inspektorat Jenderal,



Dr. Murdiyono
 NIP. 19610331 198603 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Irmansyah Rachman

Jabatan : Inspektur Wilayah I pada Inspektorat Jenderal KLHK

selanjutnya disebut dengan pihak pertama.

Nama : Dr. Ir. Ilyas Asaad, MP., MH

Jabatan : Inspektur Jenderal KLHK

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2019

Pihak Kedua,

Dr. Ir. Ilyas Asaad, MP., MH
NIP. 19590519 198511 1 001

Pihak Pertama,

Ir. Irmansyah Rachman
NIP. 19610415 198903 1 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pengawasan internal yang berkualitas	Berkurangnya jumlah Satker dengan temuan berulang	3 satker
2	Mempertahankan opini WTP	Maksimum temuan Kerugian Negara (APBN) hasil pemeriksaan BPK-RI (rata-rata lima tahun terakhir)	3,1 Milyar
3	Peningkatan nilai implementasi SAKIP.	Tercapainya nilai akuntabilitas kinerja Eselon I	78 point

Kegiatan/Output :

Anggaran

1. Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah I
 - a. Layanan audit internal.

Rp 5.213.440.000,00

Inspektur Jenderal

Dr. Ir. Ilyas Asaad, MP., MH
NIP. 19590519 198511 1 001

Jakarta, 2019

Inspektur Wilayah I

Ir. Irmansyah Rachman
NIP. 19610415 198903 1 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 1 Tahun	Target Per Triwulan			
				I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pengawasan internal yang berkualitas	Berkurangnya jumlah Satker dengan temuan berulang	3 satker	-	-	-	3 satker
2	Mempertahankan opini WTP	Maksimum temuan Kerugian Negara (APBN) hasil pemeriksaan BPK-RI (rata-rata lima tahun terakhir)	3,1 Milyar	-	-	-	3,1 M
3	Peningkatan nilai implementasi SAKIP.	Tercapainya nilai akuntabilitas kinerja Eselon I	78 point	-	78 point	78 point	78 point

Kegiatan/Output :

Anggaran

1. Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah I
a. Layanan audit internal.

Rp 5.213.440.000,00

Inspektur Jenderal



Dr. Ir. Ilyas Asaad, MP., MH
NIP. 19590519 198511 1 001

Jakarta, 2019

Inspektur Wilayah I



Ir. Irmansyah Rachman
NIP. 19610415 198903 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Sumarto., MM.

Jabatan : Inspektur Wilayah II pada Inspektorat Jenderal KLHK

selanjutnya disebut dengan pihak pertama.

Nama : Dr. Ir. Ilyas Asaad, MP., MH

Jabatan : Inspektur Jenderal KLHK

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

2019

Pihak Kedua,

Dr. Ir. Ilyas Asaad, MP., MH
NIP. 19590519 198511 1 001

Pihak Pertama,

Ir. Sumarto., MM.
NIP. 19610708 198703 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pengawasan internal yang berkualitas	Berkurangnya jumlah Satker dengan temuan berulang	3 satker
2	Mempertahankan opini WTP	Maksimum temuan Kerugian Negara (APBN) hasil pemeriksaan BPK-RI (rata-rata lima tahun terakhir)	3,1 Milyar
3	Peningkatan nilai implementasi SAKIP.	Tercapainya nilai akuntabilitas kinerja Eselon I	78 point

Kegiatan/Output :

Anggaran

1. Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah II
 - a. Layanan audit internal.

Rp 5.279.228.000,00

Inspektur Jenderal



Dr. Ir. Ilyas Asaad, MP., MH
NIP. 19590519 198511 1 001

Jakarta, 2019

Inspektur Wilayah II



Ir. Sumarto., MM.
NIP. 19610708 198703 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 1 Tahun	Target Per Triwulan			
				I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pengawasan internal yang berkualitas	Berkurangnya jumlah Satker dengan temuan berulang	3 satker	-	-	-	3 satker
2	Mempertahankan opini WTP	Maksimum temuan Kerugian Negara (APBN) hasil pemeriksaan BPK-RI (rata-rata lima tahun terakhir)	3,1 Milyar	-	-	-	3,1 M
3	Peningkatan nilai implementasi SAKIP.	Tercapainya nilai akuntabilitas kinerja Eselon I	78 point	-	78 point	78 point	78 point

Kegiatan/Output :

Anggaran

1. Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah II
a. Layanan audit internal. Rp 5.279.228.000,00

Inspektur Jenderal


Dr. Ir. Ilyas Asaad, MP., MH
NIP. 19590519 198511 1 001

Jakarta, 2019

Inspektur Wilayah II


Ir. Sumarto., MM.
NIP. 19610708 198703 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Ir. Suhaeri, B.Sc,F.,M.Si.

Jabatan : Inspektur Wilayah III pada Inspektorat Jenderal KLHK

selanjutnya disebut dengan pihak pertama.

Nama : Dr. Ir. Ilyas Asaad, MP., MH

Jabatan : Inspektur Jenderal KLHK

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2019

Pihak Kedua,

Dr. Ir. Ilyas Asaad, MP., MH
NIP. 19590519 198511 1 001

Pihak Pertama,

Dr. Ir. Suhaeri, B.Sc,F.,M.Si.
NIP. 19610710 198803 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pengawasan internal yang berkualitas	Berkurangnya jumlah Satker dengan temuan berulang	3 satker
2	Mempertahankan opini WTP	Maksimum temuan Kerugian Negara (APBN) hasil pemeriksaan BPK-RI (rata-rata lima tahun terakhir)	3,1 Milyar
3	Peningkatan nilai implementasi SAKIP.	Tercapainya nilai akuntabilitas kinerja Eselon I	78 point

Kegiatan/Output :

Anggaran

1. Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah III
 - a. Layanan audit internal.

Rp 6.104.075.000,00

Inspektur Jenderal



Dr. Ir. Ilyas Asaad, MP., MH
NIP. 19590519 198511 1 001

Jakarta, 2019

Inspektur Wilayah III



Dr. Ir. Suhaeri, B.Sc., F., M.Si.
NIP. 19610710 198803 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 1 Tahun	Target Per Triwulan			
				I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pengawasan internal yang berkualitas	Berkurangnya jumlah Satker dengan temuan berulang	3 satker	-	-	-	3 satker
2	Mempertahankan opini WTP	Maksimum temuan Kerugian Negara (APBN) hasil pemeriksaan BPK-RI (rata-rata lima tahun terakhir)	3,1 Milyar	-	-	-	3,1 M
3	Peningkatan nilai implementasi SAKIP.	Tercapainya nilai akuntabilitas kinerja Eselon I	78 point	-	78 point	78 point	78 point

Kegiatan/Output :

Anggaran

1. Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah III
 - a. Layanan audit internal.

Rp 6.104.075.000,00

Inspektur Jenderal


Dr. Ir. Ilyas Asaad, MP., MH
NIP. 19590519 198511 1 001

Jakarta, 2019

Inspektur Wilayah III


Dr. Ir. Suhaeri, B.Sc,F.,M.Si.
NIP. 19610710 198803 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Muhammad Yunus, M.Si.

Jabatan : Inspektur Wilayah IV pada Inspektorat Jenderal KLHK

selanjutnya disebut dengan pihak pertama.

Nama : Dr. Ir. Ilyas Asaad, MP., MH

Jabatan : Inspektur Jenderal KLHK

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2019

Pihak Kedua,

Dr. Ir. Ilyas Asaad, MP., MH
NIP. 19590519 198511 1 001

Pihak Pertama,

Drs. Muhammad Yunus, M.Si.
NIP. 19610116 199503 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pengawasan internal yang berkualitas	Berkurangnya jumlah Satker dengan temuan berulang	3 satker
2	Mempertahankan opini WTP	Maksimum temuan Kerugian Negara (APBN) hasil pemeriksaan BPK-RI (rata-rata lima tahun terakhir)	3,1 Milyar
3	Peningkatan nilai implementasi SAKIP.	Tercapainya nilai akuntabilitas kinerja Eselon I	78 point

Kegiatan/Output :

Anggaran

1. Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah IV
 - a. Layanan audit internal.

Rp 5.602.160.000,00


Inspektur Jenderal

Jakarta,

2019

Inspektur Wilayah IV


Dr. Ir. Ilyas Asaad, MP., MH
NIP. 19590519 198511 1 001


Drs. Muhammad Yunus, M.Si.
NIP. 19610116 199503 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 1 Tahun	Target Per Triwulan			
				I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pengawasan internal yang berkualitas	Berkurangnya jumlah Satker dengan temuan berulang	3 satker	-	-	-	3 satker
2	Mempertahankan opini WTP	Maksimum temuan Kerugian Negara (APBN) hasil pemeriksaan BPK-RI (rata-rata lima tahun terakhir)	3,1 Milyar	-	-	-	3,1 M
3	Peningkatan nilai implementasi SAKIP.	Tercapainya nilai akuntabilitas kinerja Eselon I	78 point	-	78 point	78 point	78 point

Kegiatan/Output :

Anggaran

1. Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah IV
 - a. Layanan audit internal.

Rp 5.602.160.000,00

Jakarta,

2019

Inspektur Jenderal

Inspektur Wilayah IV



Dr. Ir. Ilyas Asaad, MP., MH
 NIP. 19590519 198511 1 001



Drs. Muhammad Yunus, M.Si.
 NIP. 19610116 199503 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Tri Bangun Laksana

Jabatan : Inspektur Investigasi

selanjutnya disebut dengan pihak pertama.

Nama : Dr. Ir. Ilyas Asaad, MP., MH

Jabatan : Inspektur Jenderal

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Dr. Ir. Ilyas Asaad, MP., MH
NIP. 19590519 198511 1 001

Jakarta, 2019

Pihak Pertama,

Drs. Tri Bangun Laksana
NIP. 19631012 199403 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pengawasan kasus yang berindikasi KKN	Jumlah kasus yang diselesaikan melalui pengawasan investigatif	20 kasus
2	Penanganan pengaduan masyarakat (Dumas)	Jumlah pengaduan masyarakat (Dumas) yang diselesaikan	20 dumas
3	Pengembangan unit kerja menuju wilayah bebas korupsi (WBK)	Jumlah rekomendasi unit kerja yang WBK (5 satker/tahun)	5 rekomendasi

Kegiatan/Output :

Anggaran

1. Pengawasan Terhadap Kasus Pelanggaran yang Berindikasi KKN
 - a. Rekomendasi unit kerja yang WBK (5 Satker/Tahun).
 - b. Layanan audit internal.

Rp 5.410.920.000,00

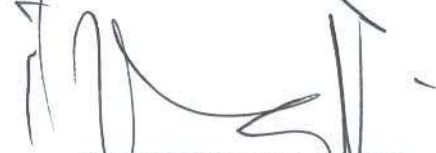
Inspektur Jenderal,



Dr. Ir. Ilyas Asaad, MP., MH
NIP. 19590519 198511 1 001

Jakarta, 2019

Inspektur Investigasi,



Drs. Tri Bangun Laksana
NIP. 19631012 199403 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 1 Tahun	Target Per Triwulan			
				I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pengawasan kasus yang berindikasi KKN	Jumlah kasus yang diselesaikan melalui pengawasan investigatif.	20 kasus	0	1	16	20
2	Penanganan pengaduan masyarakat (Dumas)	Jumlah pengaduan masyarakat (Dumas) yang diselesaikan	20 dumas	2	8	14	20
3	Pengembangan unit kerja menuju wilayah bebas korupsi (WBK)	Jumlah rekomendasi unit kerja yang WBK (5 satker/tahun)	5 rekomendasi	0	2	3	5

Kegiatan/Output :

Anggaran

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <p>1. Pengawasan Terhadap Kasus Pelanggaran yang Berindikasi KKN.</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Rekomendasi unit kerja yang WBK (5 Satker/Tahun).</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Layanan audit internal.</p> | <p>Rp 5.410.920.000,00</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|

Inspektur Jenderal,



Dr. Ir. Ilyas Asaad, MP., MH
NIP. 19590519 198511 1 001

Jakarta, 2019

Inspektur Investigasi,



Drs. Tri Bangun Laksana
NIP. 19631012 199403 1 001

Satker Yang Berkurang Temuan Berulanginya
Pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah I

No.	Nama Satker
1.	BBKSDA Sumatera Utara
2.	BBKSDA Riau
3.	BKSDA Sumatera Selatan
4.	BKSDA Bengkulu
5.	BKSDA Aceh
6.	BKSDA Sumatera Barat
7.	BTN Tesso Nilo
8.	BTN Bukit Tiga Puluh
9.	BPKH Wil I Medan
10.	NPKH XVIII Banda Aceh
11.	BPKH Wil II Palembang
12.	BPDASHL Sei Jang Duriangkang
13.	BPKH XII Tanjung Pinang
14.	PPPE Sumatera
15.	BPHP Wil III Pekanbaru
16.	SMKKN Pekanbaru
17.	BPKH XIX Pekanbaru
18.	Dit. PJLHK
19.	Dit. PIKA
20.	Dit. KK
21.	Dit. KKH
22.	BBTN Bukit Barisan Selatan
23.	BTN Way Kambas
24.	BPKH XX Bandar Lampung
25.	BPHP Wil. IV Jambi
26.	BBTN Gunung Leuser

No.	Nama Satker
27.	BTN Batang Gadis
28.	BDK Pekanbaru
29.	BLTSTH Kuok
30.	BBTN Kerinci Seblat
31.	BTN Bukit Dua Belas
32.	BTN Berbak Sembilang
33.	BKSDA Jambi

**REKAP JUMLAH SATKER YANG BERKURANG TEMUAN BERULANG
INSPEKTORAT WILAYAH II**

No.	Nama Satker
1.	BBKSDA Jawa Barat
2.	BKSDA Bali
3.	BKSDA NTB
4.	BPKH Wilayah VII Denpasar
5.	BPKH Wilayah XI Yogyakarta
6.	BPKH Wilayah XIV Kupang
7.	BTN Alas Purwo
8.	BTN Baluran
9.	P3E Bali dan Nusa Tenggara
10.	BTN Gunung Rinjani
11.	BTN Gunung Merbabu
12.	P3E Jawa
13.	BTN Gunung Ceremai
14.	BTN Gunung Merapi
15.	BBKSDA NTT
16.	BPPHLHK Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara
17.	BPPIKHL Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara
18.	BTN Matalawa
19.	BKSDA Jawa Tengah
20.	BTN Kelimutu
21.	BTN Tambora
22.	BTN Kepulauan Seribu
23.	BPPLHK
24.	BBTN Bromo Tengger Semeru
25.	BTN Gunung Halimun Salak
26.	BTN Gunung Gede Panggarango
27.	BTN Karimunjawa
28.	BTN Ujung Kulon
29.	BKSDA DKI Jakarta

**REKAP JUMLAH SATKER YANG BERKURANG TEMUAN BERULANG
INSPEKTORAT WILAYAH III**

No.	Nama Satker
1.	Litbang Kalimantan Selatan
2.	SMKK Kalimantan Timur
3.	Litbang Manokwari
4.	SMKK Manokwari
5.	BTN Kayanmentarang

**REKAP JUMLAH SATKER YANG BERKURANG TEMUAN BERULANG
INSPEKTORAT WILAYAH IV**

No.	Nama Satker
1.	BBKSDA Sulawesi Selatan
2.	BKSDA Sulawesi Utara
3.	BKSDA Maluku
4.	BPKH Wilayah VI Manado
5.	BPKH Wilayah VII Makassar
6.	BPKH Wilayah XV Gorontalo
7.	BPKH Wilayah XVI Palu
8.	BPKH Wilayah XXII Kendari
9.	BTN BantimurungBulusaraung
10.	BPPIKHL Wilayah Sulawesi
11.	BTN Taka Bonerate
12.	DirektoratPencegahanDampakLingkunganKebijakan Wilayah danSektor
13.	Biro KerjaSamaLuarNegeri
14.	BTN AketajaweLolobata
15.	BTN Bunaken
16.	BPHP Wilayah XII Palu
17.	BPDASHL Sampara
18.	BBTN Lore Lindu
19.	BTN Manusela



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
INSPEKTORAT JENDERAL